



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



LAKIP

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

2024

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga tugas-tugas Pemerintahan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar dapat diselesaikan.

LAKIP ini disusun sebagai perwujudan bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik dan merupakan salah satu upaya untuk menginformasikan pertanggung jawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang telah dilakukan selama tahun 2024, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi. Untuk maksud tersebut di atas maka diperlukan pengembangan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, agar menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bertanggungjawab.

Sejalan dengan hasil tersebut diatas maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) tahun 2024 yang memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan serta pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana tahun 2024 sebagai wujud pertanggung jawaban dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran BPBD.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggarakan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Polewali Mandar, tidak terlepas dari kerjasama semua pihak baik dalam perumusan program kegiatan, maupun dalam implementasi dan pelaksanaan pengawasannya.

Kami sadari dalam penyusunan laporan ini, masih jauh dari kesempurnaan dan belum sesuai dengan yang diharapkan, olehnya itu kami sangat mengharapkan umpan balik, saran dan masukan dari bernagai pihak dalam rangka penyempurnaan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan untuk masa yang akan datang dapat lebih sempurna lagi.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi penyusunan LAKIP ini sehingga dapat diselesaikan.

Polewali, Februari 2025

Kepala Pelaksana,
BPBD Kabupaten Polewali Mandar

MUH. FAIZAL, ST.,M.A.P

Pangkat : Pembina

Nip : 19750429 200604 1 011

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja BPBD yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Perubahan BPBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024. Pencapaian sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis serta melakukan evaluasi dan penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan terhadap pencapaian sasaran-sasaran strategis organisasi, sehingga pada periode berikutnya dapat dilakukan upaya-upaya perbaikan kebijakan, strategi dan aksi untuk hasil yang lebih memuaskan.

Beberapa Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024, dengan Capaian Sebagai Berikut :

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Indikator : Indeks Ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana	Sedang (0,43)	Sedang (0,48)	111,62
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Indikator : Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB (80,00)	BB (73,23)	91,53
Indikator : Persentase Tertip Pengelolaan Keuangan dan Aset PD	100%	100%	100
Indikator : Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik PD	Sangat Baik (98,00)	Sangat Baik (98,64)	100

Pencapaian sasaran tersebut telah dialokasikan anggaran Tahun 2024 sebesar **Rp. 1.943.774.783,-** dan terealisasi **Rp. 1.933.260.827,-** dengan persentase realisasi **99,31%**. Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024, secara keseluruhan dapat dinyatakan berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar 100,78%, serta capaian kinerja keuangan sebesar 99,50%. Sehingga BPBD berhasil melakukan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 1,28% jika di ukur dari capaian kinerja.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. GAMBARAN UMUM.....	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	6
C. ISU STRATEGIS ORGANISASI	27
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS	29
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	33
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	
A. AKUNTABILITAS KINERJA	37
➤ TUJUAN	38
a. Sasaran Strategis 1	38
b. Sasaran Strategis 2	48
c. Sasaran Strategis 3.....	51
d. Sasaran Strategis 4	53
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	54
BAB IV. PENUTUP.....	57

DAFTAR CHART

Chart 3.1 Perbandingan Pascabencana Yang Tertangani dari Tahun 2019 s/d 2024.	43
Chart 3.2 Capaian Peningkatan Kualitas Penanganan Kebencanaan Tahun 2024 serta Perbandingan Realisasi 2019 – 2023.....	44
Chart 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Kepuasan Pelayanan Publik Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2021 s/d 2023 serta Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024.....	48
Chart 3.4 Alokasi Belanja Langsung dan Realisasi Anggaran BPBD Tahun 2024.....	54

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan Golongan Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional	3
2. Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian.....	4
3. Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019 - 2024.....	33
4. Tabel 2.2 Program dan Anggaran Tahun 2024 BPBD Kab. Polewali Mandar.....	35
5. Tabel 3.1 Daftar Kecamatan Telah Dipasangi Papan Peringatan Dini Bencana.....	39
6. Tabel 3.2 Jumlah, Jenis & Intensitas Bencana yang Terjadi di Kecamatan Tahun 2019 – 2024 Kabupaten Polewali Mandar	41
7. Tabel 3.3 Hasil Survei Layanan Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2022 s/d 2024.....	48
8. Tabel 3.4 Perkembangan Penilaian SAKIP BPBD Tahun 2020 – 2023.....	52
9. Tabel 3.5 Nilai Efisiensi Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	55

BAB 1

Pendahuluan

A. Umum

1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Lakip adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu Instansi Pemerintah. Lakip sebagai dokumen yang dibuat oleh instansi pemerintah untuk mengevaluasi kinerja instansi yang dipimpinnya selama satu tahun anggaran. Dalam penyusunan Lakip, suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase.

Penyusunan Lakip Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan siklus anggaran yang berjalan yaitu satu tahun. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Dalam penyusunan suatu kegiatan belanja, dibuat suatu masukan yaitu besaran dana yang dibutuhkan, hasil yaitu sesuatu bentuk nyata yang didapat dari dana yang dikeluarkan, manfaat yang didapat karena kegiatan belanja tersebut dilaksanakan serta dampak yang dihasilkan karena pelaksanaan suatu kegiatan belanja.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Polewali Mandar merupakan unsur penunjang tugas Kepala Daerah dalam bidang penanggulangan Bencana dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. sebagai salah satu instansi pemerintah, unsur penyelenggara pemerintahan di daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Dalam hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai dengan Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengolahan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategi (Strategic Planning) yang ditetapkan. Instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategi organisasi kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP dilakukan melalui proses penyusunan rencana strategi, penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja. Adapun pedoman penyusunan LAKIP, disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Penyusunan LAKIP ini berdasarkan siklus anggaran yang berjalan dalam tahun 2024.

Esensi dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintah untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategi dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan Kegiatan) yang selaras atas dasar siklus sistem LAKIP.

Dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar diperlukan sumber daya manusia. Adapun Sumber Daya Manusia yang terdapat pada BPBD Kabupaten Polewali Mandar antara lain :

➤ Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan data kepegawaian BPBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 jumlah pegawai ASN sebanyak 15 Orang yang terdiri dari 4 pejabat struktural, 3 pejabat fungsional, 8 orang staf serta ditambah pegawai tidak tetap (PTT) sebanyak 22 orang. Kondisi sumber daya manusia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional BPBD Kabupaten Polewali Mandar.

Jumah Pegawai ASN/PTT	Kualifikasi Pendidikan		Pangkat / Golongan		Jabatan Struktural		Jabatan Fungsional
37	S2	4	IV/c	-	Eselon II.a	-	
	S1	20	IV/b	-	Eselon III.a	-	3
	D3	2	IV/a	3	Eselon III.b	3	
	D2	-	III/d	2	Eselon IV.a	4	
	SLTA	11	III/c	3	Eselon IV.b	0	
	SLTP	-	III/b	4	Pelaksana (Staf)	8	
	SD	-	III/a	2			
			II/d	1			
			II/c				

Sumber : Sekretariat BPBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	PNS	Staf/PTT
1.	15 Orang	22 Orang

Sumber : *Sekretariat BPBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024*

2. Maksud dan Tujuan.

a. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024, dimaksud untuk :

1. Mempertanggungjawabkan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Polewali Mandar.
2. Untuk memaparkan pencapaian tujuan, sasaran dan indikator sasaran BPBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 yang tertuang dalam penetapan kinerja BPBD Tahun 2024.
3. Agar dapat diperoleh umpan balik bagi peningkatan kinerja pemerintah pada tahun-tahun selanjutnya.
4. Untuk menggambarkan perbandingan capaian indikator kinerja tahun-tahun sebelumnya sampai dengan tahun berjalan.
5. Untuk menyajikan keberhasilan dan kegagalan berikut kendala dan solusi yang dilakukan pada tahun anggaran 2024.

b. Adapun Tujuan Penyusunan LAKIP BPBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024, adalah:

1. Untuk menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar serta stakeholder yang membutuhkan;
2. Untuk menjadi bahan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja periode yang akan datang;
3. Untuk menjadi bahan penyempurnaan pelaksanaan proram dan kegiatan yang akan datang;

4. Untuk menjadi bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
5. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan/publik atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
6. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dengan LAKIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada semua pihak yang berkepentingan mengenai kinerja yang telah dicapai selama kurun waktu Tahun 2024. Selanjutnya dapat diharapkan pula adanya masukan-masukan sebagai umpan balik yang bermanfaat dan alternatif pemecahan masalah-masalah yang dihadapi, yang semuanya mengarah pada peningkatan kinerja yang pada gilirannya mencapai pelayanan umum yang optimal kepada masyarakat.

3. Landasan Hukum.

Adapun Landasan hukum penyusunan LAKIP ini antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2016

- tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 1);
 9. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 20 Tahun 2018 tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 10. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Bencana Logistik Permakanan dan Non Permakanan serta Bahan Bangunan Rumah Akibat Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan nasional penanggulangan bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan

bencana, penanganan darurat rehabilitasi, restrukturisasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

- b. Melakukan pengendalian dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana di wilayah Kabupaten Polewali Mandar dengan berpedoman kepada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bakornas Penanggulangan Bencana dan Satkorlak Penanggulangan Bencana, baik pada tahap sebelum, sedang terjadi maupun sesudah bencana terjadi yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan dan penyelamatan serta rehabilitasi rekonstruksi;
- c. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyusun, Menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Selain tugas pokok, Badan Penanggulangan Bencana menjalankan fungsi (1). **Koordinasi** penanggulangan bencana;(2). **Komando** penanggulangan bencana; dan (3). **Pelaksana** penanggulangan bencana. Ketiga fungsi tersebut dijabarkan kedalam kegiatan strategis dalam penanggulangan bencana. **Koordinasi** penanggulangan bencana dilaksanakan melalui dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/ atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut salah satunya adalah penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. Dalam kondisi tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjalankan fungsi **komando** dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan instansi terkait. Fungsi yang terakhir adalah peran **pelaksana**, terkait dengan kondisi pascabencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana; kebijakan pembangunan nasional, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan struktur kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Polewali Mandar, maka dapat dibagi sesuai tugas dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :

A. Tugas

Tugas pokok unsur pelaksana BPBD adalah merumuskan menetapkan, memimpin, menkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Rincian tugas Unsur Pelaksana BPBD :

- a. Menyelenggarakan, memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD;

- b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis BPBD sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
- c. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang penanggulangan bencana daerah;
- d. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan penanggulangan;
- e. Menyelenggarakan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, pencegahan, dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah;
- g. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan LAKIP, LKPJ, LPPD, pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi: kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- h. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, unsur pelaksana BPBD mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan, perumusan dan penetapan kebijakan teknis pada BPBD yang meliputi kesekretariatan, pencegahan dan

kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;

- b. Perumusan dan penetapan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang penanggulangan bencana;
- c. Penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian pelaksanaan tugas tugas di bidang penanggulangan bencana daerah;
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi BPBD;

Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari :

- a. Kepala pelaksana ;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

1. KEPALA PELAKSANA

Kepala Pelaksana yang mempunyai tugas pokok membantu kepala BPBD dalam hal menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala pelaksana BPBD mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan keuangan;
- d. Pengoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
- e. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana; dan
- f. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Rincian tugas Unsur Pelaksana BPBD:

- a. Menyusun rencana kegiatan kepala pelaksana BPBD sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksana tugas kepada bawahan sehingga Pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Membina, mengawasi, mengendalikan kegiatan penanggulangan bencana;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
- h. Mengevaluasi dan menindak lanjuti hasil pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana;
- i. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik;
- j. Melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan ketatalaksanaan lingkup BPBD;
- k. Menyusun laporan hasil pelaporan hasil pelaksanaan tugas unsur pelaksana BPBD dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian pelayanan administrasi, dan pelaksana di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pokoknya sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan barang perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi , pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh unsur pelaksana BPBD sesuai dengan tugas Dan fungsinya;
 - e. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) BPBD;
 - f. Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) BPBD;
 - g. Melaksanakan penyusunan, pengelolaan program, data dan evaluasi kegiatan ;
 - h. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
 - i. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap instansi terkait;
 - j. Melaksanakan penyusunan hasil pelaksanaan kegiatan ;
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Kepegawaian dan Umum.

➤ ***Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan.***

Sub bagian perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan dan data dalam rangka penyusunan program perencanaan melakukan koordinasi penyusunan program dan pelaporan tugas-tugas bidang. Dalam melaksanakan tugas pokoknya sub bagian perencanaan dan pelaporan mempunyai fungsi;

- a. Penyusunan bahan kebijakan dan pengelolaan program perencanaan, dan pelaporan ;
- b. Penyusunan , pengelolaan dan penyajian laporan tugas-tugas bidang;
- c. Penyajian program perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan,
- d. Pelaksanaan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) BPBD.

Rincian Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan :

- a. Melaksanakan pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan, pengelolaan program;
- b. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan program;
- c. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyajian program, perencanaan dan pelaporan ;
- d. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) BPBD;
- e. Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP);
- f. Melaksanakan pengelolaan, data evaluasi kegiatan;
- g. Melaksanakan penyusunan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;

- h. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap instansi terkait;
- i. Melaksanakan penyusunan hasil pelaksanaan kegiatan;
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan;

➤ ***Sub Bagian Keuangan***

Sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan sekretariat BPBD. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, sub bagian keuangan mempunyai fungsi;

- a. Penyusunan bahan rencana anggaran belanja BPBD;
- b. Pengelolaan administrasi penggunaan keuangan;
- c. Koordinasi pengelolaan keuangan;
- d. Penyusunan laporan penggunaan anggaran.

Rincian tugas sub bagian keuangan;

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja sub bagian keuangan;
- b. Melaksanakan pengumpulan data dalam rangka penyusunan, pengelolaan, penyajian data keuangan;
- c. Melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
- d. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan realisasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendaharawan;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas-tugas bendaharawan lingkup BPBD;

- f. Melaksanakan verifikasi pertanggung jawaban keuangan BPBD;
- g. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan BPBD;
- h. Melaksanakan klarifikasi dan menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan fungsional (LHP);
- i. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggung jawaban keuangan BPBD;
- k. Melaksanakan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan;
- l. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

➤ **Sub bagian Umum Dan Kepegawaian**

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi;

- a. Penyusunan dan penyiapan bahan;
- b. Pengelolaan administrasi ;
- c. Penyusunan dan pengelolaan ketatausahaan:
- d. Pelaksanaan perencanaan umum.

Rincian Tugas Sub bagian Umum dan Kepegawaian:

- a. Melaksanakan dalam rangka penyusunan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian ;
- b. Melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian;

- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk/keluar dan mengklarifikasikan surat menurut jenisnya;
- d. Melaksanakan urusan kerumah tanggaan dan rencana kebutuhan perlengkapan BPBD;
- e. Melaksanakan penyusunan dan formasi jabatan serta data pegawai ;
- f. Melaksanakan pengembangan penerapan dan sistem informasi serta kepegawaian (SIMPEG);
- g. Melaksanakan koordinasi konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- h. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas bagian umum dan kepegawaian;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas menyelenggarakan fasilitasi, pengkajian, pengorganisasian, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai fungsi;

- a. Penyelenggaraan fasilitas pengkajian bahan kebijakan, strategi dan program pencegahan dan kesiapsiagaan.
- b. Penyelenggaraan fasilitas penyusunan data tentang daerah-daerah rawan bencana;
- c. Penyelenggaraan pengklasifikasian jenis bencana ada data daerah rawan bencana;
- d. Penyelenggaraan fasilitas pengorganisasian dan pelaksanaan program pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ;

Rincian tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan:

- a. Menyelenggarakan program kerja bidang pencegahan dan kesiapsiagaan ;
 - b. Menyelenggarakan fasilitas pengkajian bahan kebijakan, strategi dan program kesiapsiagaan;
 - c. Menyelenggarakan fasilitas penyusunan kriteria dan prosedur pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - d. Penyelenggaraan fasilitas pengorganisasian dan pelaksanaan program, bimbingan pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - e. Penyelenggaraan fasilitasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - f. Menyelenggarakan koordinasi dengan bahan koordinasi dan pembangunan dalam melaksanakan kegiatan di kabupaten /kota;
 - g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan ;
 - h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang pencegahan;
 - i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit terkait;
 - j. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, terdiri:

- a. Koordinator Seksi pencegahan ; dan
- b. Koordinator Seksi kesiapsiagaan

➤ ***Koordinator Seksi Pencegahan***

Seksi pencegahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan pembinaan serta fasilitas pengelolaan pencegahan bencana.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(1). Seksi pencegahan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan fasilitas penyusunan bahan kebijakan, standar, kriteria dan prosedur pencegahan serta bimbingan teknis penyelenggaraan pencegahan terhadap lembaga pemerintah dan swasta ;
- b. Pelaksanaan fasilitas pengorganisasian pelaksanaan program pencegahan bencana ;
- c. Pelaksanaan fasilitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pencegahan bencana.

Rincian tugas seksi pencegahan :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi pencegahan.
- b. Melaksanakan fasilitas penyusunan bahan kebijakan, standar kriteria dan prosedur pencegahan bencana;
- c. Melaksanakan fasilitas bimbingan teknis penyelenggaraan pencegahan bencana terhadap lembaga pemerintah dan swasta;
- d. Melaksanakan fasilitas pengorganisasian dan pelaksanaan program pencegahan bencana;
- e. Melaksanakan fasilitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pencegahan bencana;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi pencegahan bencana;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan.

➤ ***Koordinator Seksi Kesiapsiagaan***

Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitas, koordinasi dan pelaksanaan pengorganisasian dan

pengujian sistem peringatan dini, penyuluhan, pelatihan dan gladi penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur kesiapsiagaan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan fasilitas penyusunan bahan kebijakan, standar, kriteria dan prosedur kesiapsiagaan serta bimbingan teknis penyelenggaraan kesiapsiagaan terhadap lembaga pemerintah dan swasta;
- b. Melaksanakan fasilitas pengorganisasian melaksanakan program kesiapsiagaan;
- c. Melaksanakan fasilitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kesiapsiagaan.

Rincian tugas seksi kesiapsiagaan:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi kesiapsiagaan;
- b. Melaksanakan fasilitas penyusunan bahan kebijakan, standar kriteria dan prosedur kesiapsiagaan;
- c. Melaksanakan fasilitas bimbingan teknis penyelenggaraan kesiapsiagaan terhadap lembaga pemerintah dan swasta;
- d. Melaksanakan fasilitas pengorganisasian dan pelaksanaan program kesiapsiagaan;
- e. Melaksanakan fasilitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan pelaksanaan program kesiapsiagaan;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi kesiapsiagaan;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

4. BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Bidang kedaruratan dan logistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi serta penyediaan sarana dan prasarana darurat.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, bidang kedaruratan dan logistik mempunyai fungsi;

- a. Penyelenggaraan fasilitas pengkajian bahan kebijakan, strategi dan program dan logistik;
- b. Penyelenggaraan dan fasilitas penyusunan data tentang kedaruratan dan logistik;
- c. Penyelenggaraan pengklasifikasian jenis kedaruratan dan logistik;
- d. Penyelenggaraan dan fasilitasi pengorganisasian dan pelaksanaan kedaruratan dan logistik.

Rincian tugas bidang kedaruratan dan logistik:

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang kedaruratan dan logistik;
- b. Menyelenggarakan fasilitasi pengkajian bahan kebijakan, strategi dan program kedaruratan dan logistik;
- c. Menyelenggarakan penyusunan kriteria dan prosedur pelaksanaan kedaruratan dan logistik;
- d. Menyelenggarakan fasilitasi pengorganisasian pelaksanaan program, bimbingan teknis pelaksanaan kedaruratan dan logistik;
- e. Menyelenggarakan fasilitas pemantauan evaluasi, dan pelaporan kegiatan kedaruratan dan logistik;

- f. Menyelenggarakan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintah wilayah dalam melaksanakan kegiatan di kabupaten/kota ;
- g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan kebijakan;
- h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang kedaruratan dan logistik;
- i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit terkait;
- j. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang kedaruratan dan logistik, terdiri dari.

- a. Koordinator Seksi kedaruratan.
- b. Koordinator Seksi logistik.

➤ ***Koordinator Seksi kedaruratan***

Seksi kedaruratan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan pembinaan serta fasilitas pengelolaan kedaruratan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi kedaruratan mempunyai fungsi;

- a. Melaksanakan fasilitas penyusunan bahan kebijakan, standar, kriteria dan kedaruratan serta bimbingan teknis penyelenggaraan kedaruratan terhadap lembaga pemerintah dan swasta;
- b. Pelaksanaan fasilitas pengorganisasian pelaksanaan kedaruratan;
- c. Pelaksanaan fasilitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kedaruratan;

Rincian tugas seksi kedaruratan:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi kedaruratan;
- b. Melaksanakan fasilitas penyusunan bahan kebijakan, standar kriteria dan prosedur kedaruratan;
- c. Melaksanakan fasilitas bimbingan teknis penyelenggaraan kedaruratan terhadap lembaga pemerintah dan swasta;
- d. Melaksanakan fasilitas pengorganisasian dan pelaksanaan program kedaruratan;
- e. Melaksanakan fasilitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kedaruratan;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi kedaruratan;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

➤ ***Koordinator Seksi Logistik***

Seksi logistik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan pembinaan serta fasilitas pengelolaan logistik.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi logistik mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan fasilitas penyusunan bahan kebijakan, standar, kriteria dan prosedur logistik serta bimbingan teknis penyelenggaraan logistik terhadap lembaga pemerintah dan swasta;
- b. Pelaksanaan fasilitas pengorganisasian program logistik;
- c. Pelaksanaan fasilitas pemantauan, dan pelaporan pelaksanaan logistik.

Rincian tugas seksi logistik:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi logistik;
- b. Melaksanakan fasilitas penyusunan bahan kebijakan, standar kriteria dan prosedur logistik;
- c. Melaksanakan fasilitas bimbingan teknis penyelenggaraan logistik terhadap lembaga pemetintah dan swasta;
- d. Melaksanakan fasilitas pengorganisasian dan pelaksanaan program logistik;
- e. Melaksanakan fasilitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program logistik;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi logistik;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan.

5. BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai tugas penyimpanan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, bidang rehabilitasi dan rekontruksi mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan fasilitas pengkajian bahan kebijakan, strategi dan program rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Penyelenggaraan fasilitas penyusunan data tentang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. Penyelenggaraan pengklasifikasian jenis rehabilitasi dan rekontruksi;

- d. Penyelenggaraan fasilitas pengorganisasian dan pelaksanaan program dan rekonstruksi ;

Rincian tugas bidang rehabilitasi dan rekonstruksi :

- a. Menyenggarakan pengkajian program kerja bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Menyenggarakan fasilitasi pengkajian bahan kebijakan, strategi dan program rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. Menyenggarakan fasilitasi penyusunan kriteria dan prosedur pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. Menyenggarakan fasilitasi pengorganisasian dan pelaksanaan program, bimbingan teknis pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. Menyenggarakan fasilitasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- f. Menyenggarakan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintah dan pembangunan wilayah dalam melaksanakan kegiatan di kabupaten /kota;
- g. Menyenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan;
- h. Menyenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- i. Menyenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. Menyenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi terdiri dari :

- a. Koordinator Seksi rehabilitasi ;
- b. Koordinator Seksi rekonstruksi.

➤ ***Koordinator Seksi Rehabilitasi***

Seksi rehabilitasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan pembinaan serta fasilitas pengelolaan rehabilitasi;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi rehabilitasi mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan fasilitas penyusunan bahan kebijakan, standar, kriteria dan prosedur rehabilitasi serta bimbingan teknis penyelenggaraan rehabilitasi terhadap lembaga pemerintahan dan swasta
- b. Pelaksanaan fasilitas pengorganisasian pelaksanaan program rehabilitasi;
- c. Pelaksanaan fasilitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program rehabilitasi.

Rincian tugas Seksi Rehabilitasi:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi rehabilitasi;
- b. Melaksanakan fasilitas penyusunan bahan kebijakan, standar kriteria dan prosedur rehabilitasi;
- c. Melaksanakan fasilitas bimbingan teknis penyelenggaraan rehabilitasi terhadap lembaga pemerintah dan swasta ;
- d. Melaksanakan fasilitasi pengorganisasian dan pelaksanaan program rehabilitasi;
- e. Melaksanakan fasilitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program rehabilitasi;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi rehabilitasi;

- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

➤ ***Koordinator Seksi Rekonstruksi***

Seksi rekonstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan pembinaan serta fasilitasi pengelolaan rekonstruksi. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan fasilitas penyusunan bahan kebijakan , standar , kriteria dan prosedur rekonstruksi serta bimbingan teknis penyelenggaraan rekonstruksi terhadap lembaga pemerintah dan swasta ;
- b. Pelaksanaan fasilitasi pengorganisasian pelaksanaan program rekonstruksi ;
- c. Pelaksanaan fasilitasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rekonstruksi;

Rincian tugas seksi rekonstruksi ;

- a. melaksanakan penyusunan program kerja seksi rekonstruksi;
- b. melaksanakan fasilitasi penyusunan bahan kebijakan, standar kriteria dan prosedur rekonstruksi;
- c. melaksanakan fasilitas bimbingan teknis penyelenggaraan rekonstruksi terhadap lembaga pemerintah dan swasta;
- d. melaksanakan fasilitas pengorganisasian & pelaksanaan program rekonstruksi;
- e. melaksanakan fasilitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program rekonstruksi;
- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi rekonstruksi;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. Isu Strategis Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah perangkat OPD yang menjalankan fungsi pelayanan publik pada masyarakat disamping melaksanakan tugas-tugas rutin lainnya. Berbagai permasalahan mewarnai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, baik pada faktor sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana PB dan kelembagaan maupun pada prosedur.

Isu-isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya dokumen peta rawan bencana secara periodik yang dapat menggambarkan potensi kebencanaan di Kabupaten Polewali Mandar, sehingga belum optimalnya langkah penanganan bencana pra bencana pada daerah rawan bencana.
2. Kondisi masyarakat yang terjebak dalam pemukiman daerah rawan bencana, sementara wilayah relokasi pemukiman tidak tersedia.
3. Dampak dan luasan bencana yang semakin meningkat.
4. Belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi dari tingkat desa sampai kabupaten.
5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta mobilitas penanggulangan bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
6. Basis data yang tidak teradministrasi secara regular.
7. Penilaian kerusakan dan kerugian setelah terjadi bencana yang belum akurat.
8. Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekontruksi yang berasal dari anggaran daerah.

9. Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan di Kabupaten Polewali Mandar.
10. Belum memadainya fasilitas peralatan penanggulangan bencana.
11. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Polewali Mandar.
12. Belum lengkapnya regulasi dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Polewali Mandar.
13. Belum adanya pembentukan desa tangguh bencana di Kabupaten Polewali Mandar.
14. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana di Kabupaten Polewali Mandar.
15. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi struktural penanganan bencana.
16. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Polewali Mandar.
17. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah. Penyusunan program dilaksanakan persektor dan tidak terpadu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2024 yang akan dilaksanakan melalui berbagai program kegiatan tahunan.

Dalam dokumen rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 memuat tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Rencana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar untuk tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada formulir Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

A. Rencana Strategis

Kabupaten Polewali Mandar memiliki tujuan yang jelas yaitu mensejahterakan masyarakatnya. Tujuan tersebut merupakan sebuah gambaran keadaan yang akan dicapai pada masa depan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara bersama-sama dan partisipatif diarahkan untuk senantiasa siap sedia dalam menghadapi potensi bencana.

Rencana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2024 yang mana penyusunan Renstra tersebut sebagai pedoman dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Dengan peran dan tanggung jawab yang diembankan maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus mampu mengoptimalkan perannya dan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Polewali Mandar.

Sesuai kondisi faktual lingkungan strategis upaya penanggulangan bencana, baik yang menyangkut kondisi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) serta kemampuan untuk mewujudkan sasaran kinerja secara sistematis dan bertahap yang menuntut adanya kesiapan dalam menghadapi potensi bencana serta kemampuan untuk menanggulangi bencana pada saat maupun setelahnya.

Sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar ikut berperan dalam mewujudkan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019 – 2024. Adapun visi Kabupaten Polewali Mandar adalah :

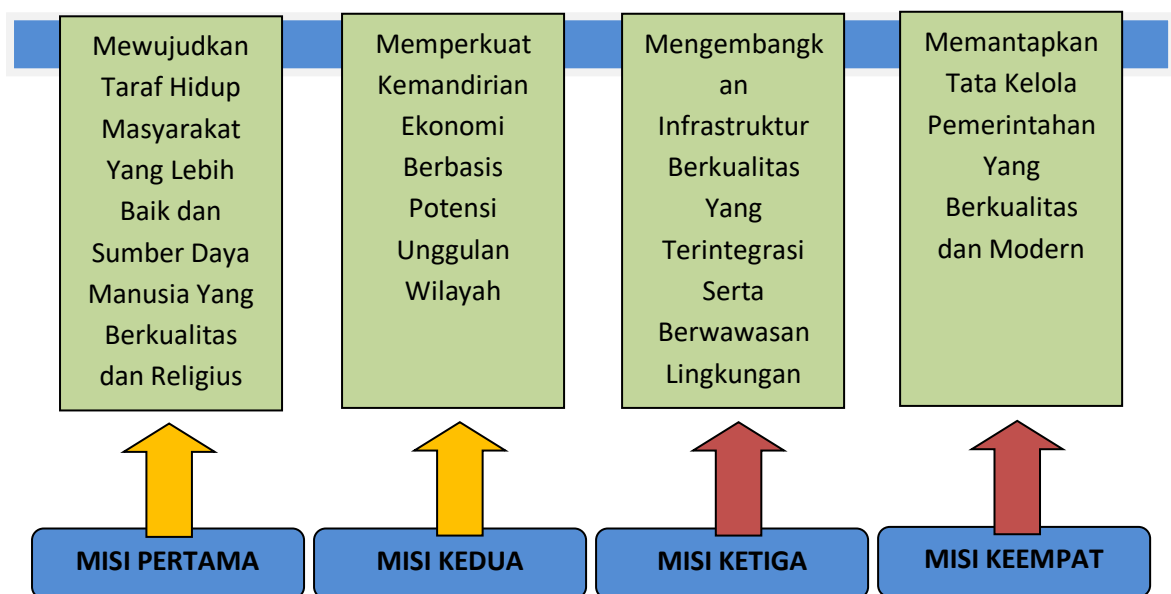
"Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera"

Penjelasan yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Polewali Mandar Maju : Kondisi daerah yang menggambarkan tentang keadaan yang lebih baik dari masa sebelumnya maupun jika dibandingkan dengan daerah lain terutama pada aspek kemandirian ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan.

Rakyat Sejahtera : Kondisi masyarakat yang memiliki taraf hidup yang lebih baik dan sumberdaya manusia yang berkualitas.

Untuk mewujudkan pencapaian visi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar di atas, maka ditetapkan empat misi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, sebagai berikut :



Berdasarkan pada **Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar** di atas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar akan mendukung sepenuhnya pencapaian visi Bupati dan wakil Bupati tahun 2019 - 2024 serta mendukung pelaksanaan misi tersebut di atas berdasarkan tupoksi OPD. Dengan melihat keterkaitan penjelasan di atas, untuk misi yang selaras dan terkait dengan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah misi 4 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan modern.

Berdasarkan Tupoksi OPD, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Polewali Mandar menetapkan dua Program utama dan delapan Kegiatan, yaitu:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan uraian Kegiatan yaitu ;**
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - c. Kegiatan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah.
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. **Program Penanggulangan Bencana.**
 - a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
 - c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
 - d. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Rumusan pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan OPD BPBD dalam lima tahun mendatang yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi dan misi RPJMD, selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebencanaan	Indeks Ketahanan Daerah

Untuk mengetahui dan mengukur capaian Tujuan dan Sasaran Strategis dimaksud, maka perlu menentukan indikator kinerja Tujuan dan Sasaran. Dalam menentukan indikator kinerja tersebut memperhatikan beberapa hal yaitu : jelas, dapat diukur, dapat disetujui, dapat dicapai, memiliki batas waktu pencapaian, dan perbaikan berkelanjutan. Indikator kinerja tujuan dan sasaran merupakan indikator Kinerja Utama (IKU). Serta disusun pula indikator sasaran strategis penunjang pencapaian IKU.

Sehingga ditetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 dengan mempertimbangkan potensi sumber daya yang dimiliki serta peluang dan kekuatan yang dimiliki.

Tabel. 2.1

Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2024

No	TUJUAN	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun ke-					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		1 Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebencanaan	Indeks Ketahanan Daerah	0.40	0.40	0.41	0.42	0.42	0.43
		2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP perangkat daerah	B	BB	BB	BB	A	A
		3 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		4 Meningkatkan Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kerja yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam kurun

waktu 1 (satu) tahun anggaran. Perjanjian kinerja merupakan proses penetapan indikator kinerja berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tujuan umum diterapkannya penetapan kinerja adalah intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel. Sedangkan tujuan khusus adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen pemerintah bersama jajaran satuan kerja, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Penyusunan program dan kegiatan prioritas ini mengacu pula pada arah dan kebijakan umum yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024. Adapun program dan kegiatan yang diprioritas pada tahun anggaran 2024 yang sesuai dengan penetapan kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Sasaran Strategis 1 :
Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebencanaan**

Indikator :
Indeks Ketahanan Daerah
Target :
0,43%

**Sasaran Strategis 2 :
Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran**

Indikator :
Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder
Target :
Sangat Baik

**Sasaran Strategis 3 :
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja**

Indikator :
Predikat SAKIP Perangkat Daerah
Target :
A

**Sasaran Strategis 4 :
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah**

Indikator :
Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Target :
WTP

Dalam pencapaian sasaran diatas tentu diperlukan Program dan Kegiatan serta alokasi anggaran yang akan dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024. Sasaran strategis, program, dan anggaran dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.2
Program dan Anggaran Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Anggaran
1	Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 284.346.304,-
		+ Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	Rp. 16.242.844,-
		+ Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp. 230.274.305,-
		+ Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Rp. 37.829.155,-
2	Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 1.659.428.479,-
		+ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 213.772.219,-

3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	✚ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	10.981.980,-
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	✚ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	1.177.331.110,-
5	Meningkatnya Tertib Administrasi BMD Perangkat Daerah	✚ Kegiatan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	Rp.	1.090.011,-
6	Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	✚ Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	12..000.500,-
7	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD	✚ Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	5.112.660,-
8	Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor	✚ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	68.153.969,-
9	Meningkatnya Kemanfaatan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	✚ Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	170.721.030,-
JUMLAH			Rp.	1.943.774.783,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA dan KEUANGAN

A. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan secara periodik keberhasilan/kegagalan pelaksanaan dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategis instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan indikator sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran dan indikator sasaran renstra, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik.

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja untuk kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024, mencakup pengukuran terhadap capaian sasaran yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi tentunya dengan tetap mempertimbangkan indikator *input*, *output* dan *outcome*, yang melekat pada *instrument* penganggaran program dan kegiatan.

Dengan demikian diperlukan analisis dan evaluasi kinerja dimaksudkan untuk menghitung nilai capaian kinerja dari setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan serta dilakukan analisis pencapaian kinerja dengan menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja yang menggambarkan kegagalan dan keberhasilan masing-masing target sasaran yang telah ditetapkan.

TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

❖ **Sasaran Strategis 1 :**

Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebencanaan.

Indikator : Indeks Ketahanan Bencana

Target : 0,43%

Dalam meningkatkan kualitas penanganan kebencanaan tentu diperlukan manajemen yang baik. Menurut UU No. 24 Tahun 2007, Manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.

Sehingga tujuan manajemen bencana cukup jelas antara lain mengurangi, atau mencegah, kerugian karena bencana, menjamin terlaksananya bantuan yang segera dan memadai terhadap korban bencana, dan mencapai pemulihan yang cepat dan efektif. Dengan demikian, siklus manajemen bencana memberikan gambaran bagaimana rencana dibuat untuk mengurangi atau mencegah kerugian karena bencana, bagaimana reaksi dilakukan selama dan segera setelah bencana berlangsung dan bagaimana langkah-langkah diambil untuk pemulihan setelah bencana terjadi.

Dengan itu langkah-langkah yang diambil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar untuk mencapai sasaran strategis adalah melakukan program dan kegiatan dalam peningkatan kualitas penanganan kebencanaan, antara lain :

Dalam sasaran strategis ini terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja yang menjadi tolak ukurnya, yaitu :






1. Persentase Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Ikut Sosialisasi dan Pelatihan
2. Waktu Tanggap Darurat Setelah Kejadian
3. Persentase Pascabencana yang Tertangani

Sehingga dibutuhkan Analisis Capaian Kinerja, Perbandingan Realisasi Kinerja dan Faktor Pendukung dan Penghambat setiap hal-hal yang telah dilakukan antara lain :

Tabel : 3.1

Daftar Kecamatan Telah Dipasang Papan Peringatan Dini Bencana

NO	KECAMATAN	JUMLAH (Unit)	KONDISI
1	Kecamatan Binuang 🚧 Desa Tonyaman	1	Baik
2	Kecamatan Polewali 🚧 Kel. Polewali 🚧 Kel. Wattang	1 1	Baik Rusak
3	Kecamatan Anreapi 🚧 Desa Kelapa Dua	2	Baik
4	Kecamatan Matakali 🚧 Desa Patampanua	-	Tidak Ada
5	Kecamatan Wonomulyo 🚧 Kel. Sidodadi	1	Baik
6	Kecamatan Tapango	-	Tidak Ada
7	Kecamatan Mapilli 🚧 Desa Bonra 🚧 Desa Segerang	1 1	Rusak Baik
8	Kecamatan Luyo 🚧 Desa Mapilli Barat	1	Baik
9	Kecamatan Campalagian 🚧 Kel. Pappang	1	Baik
10	Kecamatan Balanipa 🚧 Desa Pambusuang	1	Baik
11	Kecamatan Tinambung 🚧 Desa Tangnga- Tangnga	1	Baik

12	Kecamatan Limboro		
	 Kel. Limboro	1	Baik
13	Kecamatan Alu		
	 Desa Mombi	1	Baik
14	Kecamatan Bulu		
	 Desa Ihing	1	Baik
15	Kecamatan Matangnga		
	 Desa Ba'ba Tapua	1	Baik
16	Kecamatan Tutar		
	 Desa Ambopadang	1	Baik

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2024

Data dan informasi merupakan kebutuhan utama dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana dimana penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Selanjutnya ketiga upaya tersebut merupakan tahapan penanggulangan bencana.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca Bencana.

Untuk memastikan BPBD Kabupaten Polewali Mandar dan pemerintah setempat melakukan perlindungan dan perhatian kepada masyarakat yang terkena dampak bencana, termasuk mereka yang terpaksa mengungsi, sangatlah penting menentukan mekanisme-mekanisme pemantauan, target-target, dan indikator-indikator yang efektif melalui pencegahan bencana, pemberian bantuan, sampai ketahap pemulihan setelah terjadinya bencana.

Sehingga BPBD Kabupaten Polewali Mandar melalui indikator kinerja persentase korban bencana yang tertangani melakukan pendataan terhadap kejadian bencana yang terjadi di 16 kecamatan Polewali Mandar.

Tabel. 3.2
Jumlah, Jenis & Intensitas Bencana yang Terjadi di Kecamatan
Tahun 2019-2024
Kabupaten Polewali Mandar

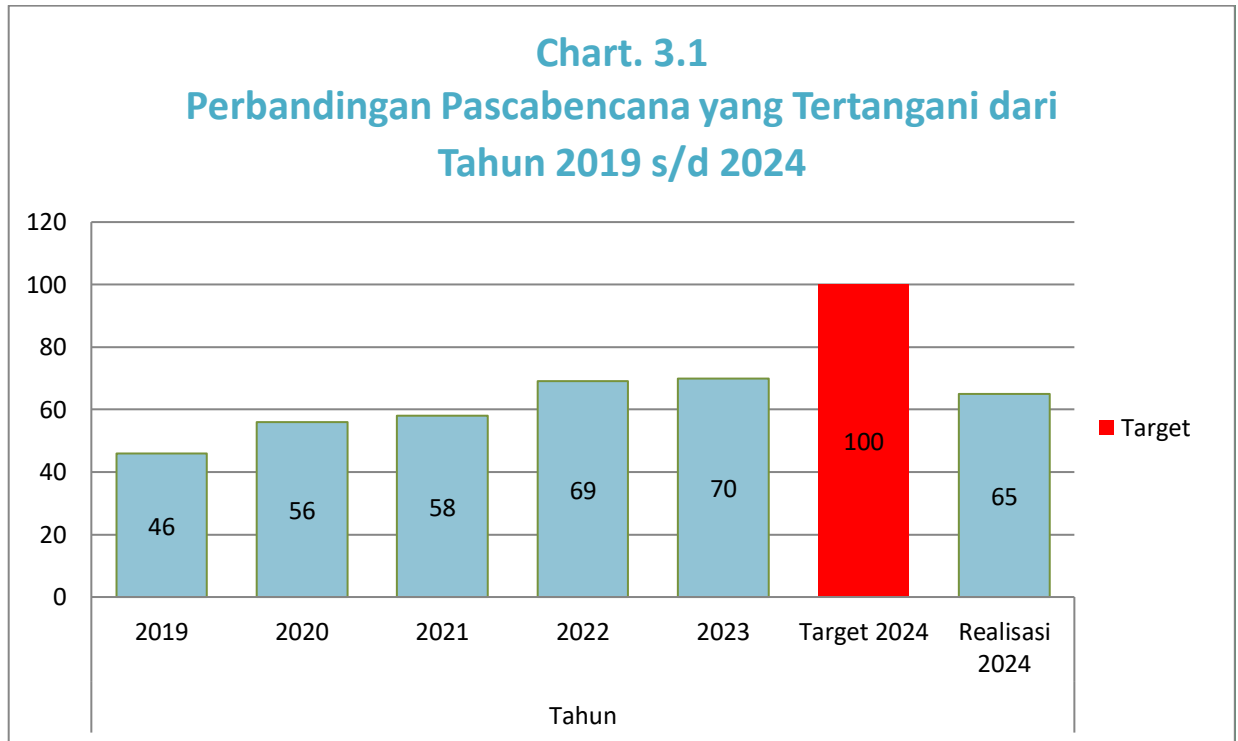
No	Kecamatan	Jenis Bencana	2019 (Kali)	2020 (Kali)	2021 (Kali)	2022 (Kali)	2023 (Kali)	2024 (Kali)
1	Tinambung	1. Banjir	-	1	-	2	-	-
		2. Tanah Longsor	-	-	-	-	-	-
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	1	-
		4. Kekeringan	1	-	-	-	-	-
		5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	-	1	1	-	-
		6. Cuaca Ekstrim/Angin Puting Beliung	2	3	2	2	2	1
		7. Gempa Bumi	-	-	-	-	-	-
		8. Tsunami	-	-	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	1	1	-	2	-	3
2	Balanipa	1. Banjir	-	-	-	-	-	-
		2. Tanah Longsor	-	-	-	-	-	-
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	2	-
		4. Kekeringan	1	-	-	-	-	-
		5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	-	-	-	-	-
		6. Cuaca Ekstrim/Angin Puting Beliung	2	2	2	1	1	1
		7. Gempa Bumi	-	-	-	-	-	-
		8. Tsunami	-	-	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	3	1	-	-	1	-
3	Limboro	1. Banjir	-	1	-	3	-	-
		2. Tanah Longsor	-	1	-	-	-	-
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	-	1
		4. Kekeringan	-	-	-	-	-	-
		5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	-	-	-	-	-
		6. Cuaca Ekstrim/Angin Puting Beliung	3	-	1	-	3	-
		7. Gempa Bumi	-	-	-	-	-	-
		8. Tsunami	-	-	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	-	-	-	-	1	1
4	Tubbitaramanu	1. Banjir	-	-	-	-	-	-
		2. Tanah Longsor	-	1	1	1	-	-
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	-	-
		4. Kekeringan	-	-	-	-	-	-
		5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	-	-	-	-	-
		6. Cuaca Ekstrim/Angin Puting Beliung	1	-	-	1	1	1
		7. Gempa Bumi	-	-	-	-	-	-
		8. Tsunami	-	-	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	1	1	-	1	-	-
		10. Kejadian Luar Biasa	-	-	-	-	-	1
5	Alu	1. Banjir	-	1	-	3	-	-
		2. Tanah Longsor	-	-	1	1	-	1
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	-	-
		4. Kekeringan	-	-	-	-	-	-
		5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	-	-	-	-	-

		6. Cuaca Ekstrim/Angin Puting Beliung	-	2	-	-	1	-
		7. Gempa Bumi	-	-	-	-	-	-
		8. Tsunami	-	-	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	2	1	-	2	-	-
6	Campalagian	1. Banjir	-	1	-	1	-	-
		2. Tanah Longsor	-	-	-	-	-	-
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	2	-
		4. Kekeringan	-	-	-	-	-	-
		5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	-	-	1	-	-
		6. Cuaca Ekstrim/Angin Puting Beliung	1	6	3	3	3	2
		7. Gempa Bumi	-	-	-	-	-	-
		8. Tsunami	-	-	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	-	-	1	3	4	3
		10. Kejadian Luar Biasa	-	-	-	-	-	1
7	Luyo	1. Banjir	-	-	1	3	-	-
		2. Tanah Longsor	-	-	-	1	-	-
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	-	-
		4. Kekeringan	-	-	-	-	-	-
		5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	-	-	-	-	-
		6. Cuaca Ekstrim/Angin Puting Beliung	-	2	2	1	2	1
		7. Gempa Bumi	-	-	-	-	-	-
		8. Tsunami	-	-	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	3	1	1	4	2	-
8	Wonomulyo	1. Banjir	-	-	-	-	-	2
		2. Tanah Longsor	-	-	-	-	-	-
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	-	-
		4. Kekeringan	-	-	-	-	-	-
		5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	1	1	-	1	-	1
		6. Cuaca Ekstrim/Angin Puting Beliung	-	-	4	-	1	2
		7. Gempa Bumi	-	-	-	-	-	-
		8. Tsunami	-	-	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	2	2	1	3	1	4
9	Mapilli	1. Banjir	-	1	1	2	-	-
		2. Tanah Longsor	-	-	-	-	-	-
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	-	-
		4. Kekeringan	-	-	-	-	-	-
		5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	-	-	-	-	-
		6. Cuaca Ekstrim/Angin Puting Beliung	1	5	2	2	3	1
		7. Gempa Bumi	-	-	-	-	-	-
		8. Tsunami	-	-	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	1	1	3	2	3	7
10	Tapango	1. Banjir	-	-	2	-	1	-
		2. Tanah Longsor	-	-	1	1	-	-
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	-	-
		4. Kekeringan	-	-	-	-	-	-
		5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	-	-	-	-	1
		6. Cuaca Ekstrim/Angin Puting Beliung	-	1	-	-	2	3
		7. Gempa Bumi	-	-	-	-	-	-
		8. Tsunami	-	-	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	1	-	-	1	3	3
11	Matakali	1. Banjir	1	1	1	-	1	2
		2. Tanah Longsor	-	-	-	-	-	-
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	-	-
		4. Kekeringan	-	-	-	-	-	-
		5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	-	-	-	-	-

		6. Cuaca Ekstrim/Angin Puting Beliung	1	1	3	1	2	1
		7. Gempa Bumi	-	-	-	-	-	-
		8. Tsunami	-	-	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	1	-	1	1	-	2
		10. Kejadian Luar Biasa	-	-	-	-	-	1
12	Bulo	1. Banjir	1	-	-	-	-	-
		2. Tanah Longsor	-	-	2	-	-	1
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	1	-
		4. Kekeringan	-	-	-	-	-	-
		5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	-	-	-	-	-
		6. Cuaca Ekstrim/Angin Puting Beliung	1	-	-	-	-	-
		7. Gempa Bumi	-	-	-	-	-	-
		8. Tsunami	-	-	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	-	1	3	-	-	-
13	Polewali	1. Banjir	1	1	-	-	2	1
		2. Tanah Longsor	-	-	-	-	-	-
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	3	-
		4. Kekeringan	-	-	-	-	-	-
		5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	1	1	2	1	-	-
		6. Cuaca Ekstrim/Angin Puting Beliung	2	4	4	1	4	2
		7. Gempa Bumi	-	-	-	-	-	-
		8. Tsunami	-	-	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	2	1	-	8	4	5
		10. Kejadian Luar Biasa	-	-	-	-	-	1
14	Binuang	1. Banjir	1	1	-	1	-	-
		2. Tanah Longsor	-	1	-	-	-	1
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	1	-
		4. Kekeringan	-	-	-	-	-	-
		5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	-	-	1	-	-
		6. Cuaca Ekstrim/Angin Puting Beliung	3	1	1	2	2	3
		7. Gempa Bumi	-	-	3	-	-	-
		8. Tsunami	-	-	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	1	1	2	1	2	-
15	Anreapi	1. Banjir	-	-	-	-	1	1
		2. Tanah Longsor	1	2	3	1	1	2
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	2	-
		4. Kekeringan	-	-	-	-	-	-
		5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	-	-	-	-	-
		6. Cuaca Ekstrim/Angin Puting Beliung	1	2	2	-	2	1
		7. Gempa Bumi	-	-	-	-	-	-
		8. Tsunami	-	-	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	1	1	1	-	-	-
16	Matangnga	1. Banjir	-	-	-	2	1	-
		2. Tanah Longsor	-	-	-	-	-	-
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	-	-
		4. Kekeringan	-	-	-	-	-	-
		5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	-	-	-	-	-
		6. Cuaca Ekstrim/Angin Puting Beliung	-	-	-	-	-	-
		7. Gempa Bumi	-	-	-	-	-	-
		8. Tsunami	-	-	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	-	-	-	-	1	-
Jumlah			46	56	58	69	70	65

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2024

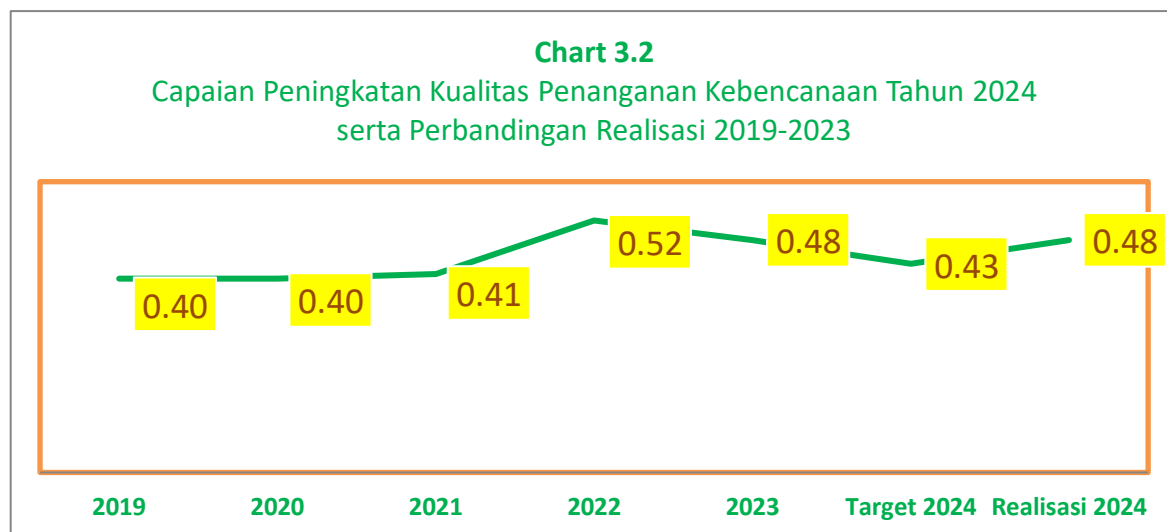
Dengan melihat tabel uraian data indikator persentase pascabencana yang tertangani dari tahun 2019 – 2024 dapat di lihat pada grafik di bawah ini :



Dengan melihat grafik di atas dari tahun 2019 kejadian bencana yang tertangani kejadian 46 Kejadian, mengalami kenaikan ditahun 2020 menjadi 56 Kejadian, kemudian tahun 2021 juga mengalami kenaikan menjadi 58 kejadian, Kemudian tahun 2022 juga mengalami kenaikan menjadi 69 Kejadian yang ditargetkan 50 Kejadian, kemudian untuk tahun 2023 kembali mengalami kenaikan menjadi 70 kejadian meskipun target yang ditetapkan adalah 100 kejadian atau persentase capaian di tahun 2023 sebesar 143%, tetapi untuk tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 65 kejadian dengan target 100 kejadian atau persentase capaian sebesar 153,84% dari target yang ditetapkan, atau jumlah kejadian tidak melebihi target yang ditetapkan oleh BPBD Kabupaten Polewali Mandar.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar juga melakukan Pemberian bantuan bencana logistik permakanaan dan non permakanaan serta bahan bangunan rumah akibat bencana sesuai dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Bencana Logistik Permakanan dan Non Permakanan serta Bahan Bangunan Rumah Akibat Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Jumlah KK yang diberikan bantuan pada tahun 2024 berjumlah 86 KK dengan kategori bencana angin puting beliung, bencana tanah longsor, dan kebakaran pemukiman.

Dari beberapa capaian program, kegiatan di atas dapat disimpulkan Perbandingan Capaian Peningkatan Kualitas Penanganan Kebencanaan dalam 5 tahun terakhir serta perbandingan dengan target yang dapat dicapai sesuai dengan target periode Renstra Perubahan 2019-2024, dapat dilihat pada chart berikut :



Mencermati chart tersebut di atas, hasil pengukuran indeks ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana masih rendah yaitu pada angka 0,41% sampai dengan tahun 2021 atau kategori kelas kapasitas sedang. Tetapi tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 0,52%, yang berarti melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,42%, kemudian tahun 2023 target yang ditetapkan

tahun 2023 sebesar 0,42% dengan capaian 0,48%, kemudian tahun 2024 capaiannya sama dengan tahun 2023 sebesar 0,48% dengan target yang ditetapkan 0,43% sesuai surat BNPB Nomor : B-06.30/BNPB/D-I/SS.01.03/01/2025 perihal Penyampaian Hasil IKD 2024 dan IRB 2024. Sehingga permasalahan yang harus mendapat perhatian untuk mengatasi masalah-masalah yang menjadi penyebab permasalahan pokok tersebut antara lain : Belum optimalnya perencanaan penanganan bencana, serta belum optimalnya sistem informasi, diklat dan logistik kebencanaan baik dari daerah maupun pusat.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang :	Faktor Penghambat :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi ,Komunikasi,Informasi dan Edukasi rawan bencana sehingga masyarakat memahami dan punya pengetahuan tentang bahaya bencana disekitarnya 2. Adanya kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 3. Adanya pemantauan di daerah-daerah terjadinya bencana sehingga data penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana tersedia 4. Adanya pendirian posko darurat bencana serta ketersediaan personil SATGAS (Satuan Tugas) Penanggulangan Bencana yang melakukan koordinasi antar dengan instansi terkait mengenai strategi dan operasi penyelamatan dan pertolongan korban bencana 5. Adanya regulasi (Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 terkait pemberian bantuan bencana logistik permakanan dan non permakanan serta bahan bangunan rumah akibat bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya masyarakat yang mengenali bahaya dan rawan bencana di sekitarnya, terutama di lereng yang curam yang sewaktu-waktu dapat mengancam. 2. Belum optimalnya pembentukan dan pengembangan desa tangguh bencana 3. Masih perlunya pengenalan, pengkajian, dan pemantauan risiko bencana 4. Belum terintegrasinya dengan baik program-program yang dapat memperluas informasi tentang penanggulangan bencana 5. Masih minimnya penanganan darurat di masyarakat pada saat terjadi bencana 6. Peralatan dan logistik kebencanaan masih sangat minim 7. Masih kurangnya harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana 8. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah. 9. Serta Dokumen KRB, PRB, dan Renkon sudah habis masa berlakunya

Solusi :

- Optimalisasi perencanaan penanganan bencana serta dukungan anggaran yang memadai
- Optimalisasi sistem informasi, diklat dan logistik kebencanaan baik dari daerah maupun pusat.
- Peningkatan kegiatan kegiatan mitigasi bencana menjadi prioritas.
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam internal BPBD dan dengan para pemangku kepentingan yang terkait penanggulangan bencana.

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran peningkatan kualitas penanganan kebencanaan, sebagai berikut :

Program dan Kegiatan yang Mendukung Capaian Target Peningkatan Kualitas Penanganan Kebencanaan Tahun 2024

Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
Program Penanggulangan Bencana	Rp. 284.346.304,-	Rp. 284.332.428,-	99,19
Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	Rp. 453.838.400,-	Rp. 453.634.450,-	100
1. Sub Keg. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 16.242.844,-	Rp. 16.242.844,-	100
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp. 230.274.305,-	Rp. 230.274.305,-	100
1. Sub Keg. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Rp. 230.274.305,-	Rp. 230.274.305,-	100
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp. 37.829.155,-	Rp. 37.815.279,-	100
1. Sub Keg. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Rp. 10.250.610,-	Rp. 10.250.610,-	100
2. Sub Keg. Koordinasi Penanganan Pascabencana Kab/Kota	Rp. 27.578.545,-	Rp. 27.564.669,-	100

❖ **Sasaran Strategis 2 :**

Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder

Target : Sangat Baik

Dalam upaya memastikan tercapainya sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah, diperlukan juga sasaran strategis peningkatan kualitas manajemen perkantoran, sehingga salah satu fungsi utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah memberikan kepuasan pelayanan kepada. Dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat BPBD Kabupaten Polewali Mandar mempunyai 2 (dua) layanan yang telah dilakukan di tahun 2021, 2022, 2023, dan tahun 2024 yaitu Layanan tanggap darurat bencana dan Layanan Pemberian Bantuan. Dengannya itu sasaran meningkatnya kualitas manajemen perkantoran Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 s/d Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

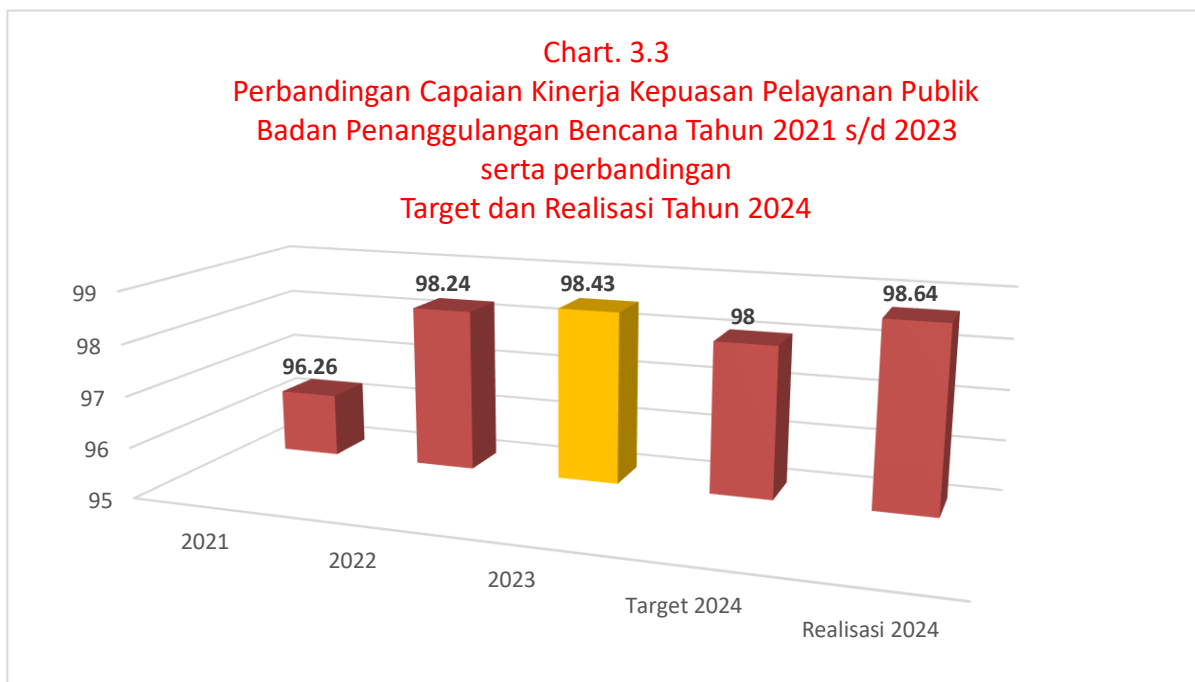
Tabel . 3.3

**Hasil Survei Layanan Badan Penanggulangan Bencana
Tahun 2022 s/d 2024**

No	Komponen Survei	Nilai Survei					
		2022		2023		2024	
		Layanan tanggap darurat bencana	Layanan Pemberian Bantuan	Layanan tanggap darurat bencana	Layanan Pemberian Bantuan	Layanan tanggap darurat bencana	Layanan Pemberian Bantuan
1	Persyaratan	98,62	96,88	99,75	99,57	99,88	99,55
2	Prosedur	98,97	96,88	97,88	99,35	98,88	99,88
3	Waktu Pelayanan	98,30	89,08	95,90	91,25	96,08	96,90
4	Biaya/Tarif	99,32	100	99,88	99,78	100	100
5	Produk Layanan	98,62	100	99,88	100	99,87	99,88
6	Kompetensi Pelaksana	94,52	95,33	99,25	99,62	96,40	99,08
7	Perilaku Pelaksana	98,62	95,33	99,88	100	99,33	99,88
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	97,60	98,45	94,78	98,92	97,20	98,76
9	Sarana dan Prasarana	97,60	89,08	97,28	98,72	97,00	97,08

Indeks Kepuasan		97,53	98,95	98,28	98,58	98,29	99,00
Rata-Rata IKM		98,24		98,43		98,64	
Mutu Pelayanan							
Tidak Baik 0 – 64,99	Kurang Baik 65,00 – 76,60	Baik 76,61 – 88,30	Sangat Baik 88,31 – 100				

Dengan melihat Tabel terkait survei kepuasan layanan tersebut, maka dapat diketahui tingkat kepuasan masyarakat atas 2 (dua) jenis layanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2022 dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat 98,24 atau mutu layanan “Sangat Baik”. Capaian ini sesuai dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2022 yaitu Sangat Baik.. Kemudian tahun 2022 capaian Indeks Kepuasan Masyarakat 98,24 atau mutu layanan “Sangat Baik” dan mencapai target. Untuk tahun 2023 capaian meningkat 0,19% dari perbandingan tahun 2022. Karena tahun 2023 capaian indeks kepuasan masyarakat 98,43% dengan mutu layanan “Sangat Baik”. Kemudian tahun 2024 capaian indeks kepuasan masyarakat 98,64% dengan mutu layanan “Sangat Baik”.



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 .

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

<p>Faktor Penunjang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya regulasi (Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 terkait pemberian bantuan bencana logistik permukiman dan non permukiman serta bahan bangunan rumah akibat bencana 2. Adanya Inovasi Pelayanan PAS KENCANA (Percepatan Assesment Korban Akibat Bencana) 3. Tersedianya TRC (Tim Reaksi Cepat) Penanggulangan Bencana di BPBD. 4. Adanya alat WRS (Warning Receiver System) dari BMKG. 5. Makin Tingginya motivasi kerja pegawai 	<p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya kelengkapan dan peralatan sarana prasarana pelayanan. 2. Terbatasnya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan 3. Masih kurangnya Sumber daya manusia yang terdapat di BPBD 4. Adanya refocusing anggaran terkait beberapa kebijakan
<p>Solusi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana kerja 2. Pengembangan Sumber daya pegawai dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan kebencanaan. 3. Penambahan personil/pegawai Badan Penanggulangan Bencana 	

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat/stakeholders, sebagai berikut :

Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
Keg. Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	1.090.011,-	1.090.011,-	100
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.090.011,-	1.090.011,-	100
Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.265.500,-	12.265.500,-	100
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	12.265.500,-	12.265.500,-	100
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	213.772.219,-	208.272.219,-	97
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.054.500,-	1.054.500,-	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	16.776.490,-	11.276.490,-	67

Kantor			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.360.000,-	18.360.000	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.368.429,-	11.368.429	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.772.800,-	155.772.800	100
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10.440.000,-	10.440.000	100
Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.112.660,-	5.112.660,-	100
Pengadaan Mebel	5.112.660,-	5.112.660,-	100
Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.153.969,-	68.153.969,-	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.000.000,-	24.000.000,-	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	33.164.759,-	33.164.759,-	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.989.210,-	10.989.210,-	100
Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.721.030,-	74.169.396,-	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	147.630.250,-	147.630.250,-	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.090.780,-	23.090.780,-	100

❖ Sasaran Strategis 3 :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja

Indikator : Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Target : A

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan dari kewajiban pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Di tingkat perangkat daerah, juga diimplementasikan Perencanaan kinerja berupa Penyusunan Renstra, renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi. Perencanaan Kinerja dilakukan secara berjenjang. Demikian pula

dengan pengukuran kinerja, dilakukan secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator sasaran, dan target yang diperjanjikan. Selanjutnya pada akhir tahun dilakukan penyusunan Laporan Kinerja berupa LAKIP dan diakhiri dengan rewiuw oleh Inspektorat.

Berikut capaian Implementasi LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai surat Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar perihal Laporan hasil evaluasi LAKIP BPBD Tahun 2023, dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini :

Tabel. 3.4
Perkembangan Penilaian SAKIP BPBD Tahun 2020 s/d 2023

Komponen Penilaian	2020	2021	2022	2023	
	Nilai	Nilai	Nilai	Bobot	Nilai
Perencanaan Kinerja	28,30	28,30	22,85	30	25,38
Pengukuran Kinerja	22,19	22,81	17,81	25	21,25
Pelaporan Kinerja	9,72	9,99	11,95	15	10,61
Evaluasi Internal	5,62	5,62	6,27	10	5,50
Capaian Kinerja	10,50	10,50	14,00	20	10,50
Nilai Hasil Evaluasi	76,33	77,22	72,88	100	73,23
Tingkat Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	BB	BB

Dengan mencermati perkembangan capaian penilaian LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tabel di atas, maka kualitas penerapan LAKIP BPBD dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dari bobot nilai 76,33 tahun 2020 menjadi nilai 77,22 di tahun 2021, di tahun 2022 bobot nilai 72,88, kemudian tahun 2023 menjadi 73,23. Hal ini berarti bahwa kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik melalui aplikasi e-SAKIP 2. Optimalnya pendampingan dan penguatan LAKIP oleh Bagian Organisasi, Bappeda, dan Inspektorat. 	Faktor Penghambat : <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih perlunya komitmen Kepala OPD serta Pejabat eselon III dan IV serta staf dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja. 2. Belum tertibnya pelaksanaan pengukuran kinerja 3. Terjadinya refocusing anggaran OPD
Solusi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya penyusunan dokumen dan kelengkapan data-data kinerja OPD. 2. Meningkatkan rapat-rapat internal untuk monitoring dan evaluasi kinerja. 	

Adapun Program dan Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, sebagai berikut :

Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.981.980,-	10.981.980,-	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.285.160,-	2.285.160,-	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.703.320,-	3.703.320,-	100
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.715.420,-	2.715.420,-	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.278.980,-	2.278.980,-	100

❖ Sasaran Strategis 4 :

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Indikator : Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Target : WTP

Salah satu tolok ukur administrasi pemerintahan yang tertib dan bersih, utamanya dalam aspek pengelolaan keuangan adalah Opini Pengelolaan Keuangan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini tertinggi adalah WTP merupakan penilaian tertinggi yang

diberikan, karena menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar, tidak terdapat kesalahan yang material, dan sesuai standar.

Sehingga disasaran strategis ini, BPBD Kabupaten Polewali Mandar turut menjadi bagian pencapaian Opini Pengelolaan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada tahun 2021 sampai tahun 2022 capaiannya adalah WTP, maka diharapkan pencapaian kembali WTP untuk tahun anggaran 2024. Hasil opini BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar masih dalam proses pemeriksaan BPK untuk tahun 2024.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang : 1. Tersedianya aplikasi Keuangan Daerah yang memudahkan tertib pengelolaan keuangan. 2. Adanya komitmen seluruh jajaran pegawai BPBD untuk mencapai WTP atau tidak adanya temuan kerugian negara dan penyimpanan administrasi dan sistem prosedur.	Faktor Penghambat : 1. Belum optimalnya pemahaman dan keterampilan pejabat pengelola keuangan dan barang. 2. Belum optimalnya sistem pengendalian internal oleh pejabat pengelola keuangan pada satuan kerja. 3. Belum optimalnya pengawasan per triwulan bagi pengelola keuangan OPD		
Solusi : 1. Perlunya penyelenggaraan pelatihan pengelolaan keuangan dan akuntansi berbasis akrual. 2. Peningkatan tertib administrasi keuangan dan pengarsipan 3. Perlunya pengawasan triwulan terhadap pengelola keuangan OPD			
Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.726.520,-	2.726.520,-	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.726.520,-	2.726.520,-	100

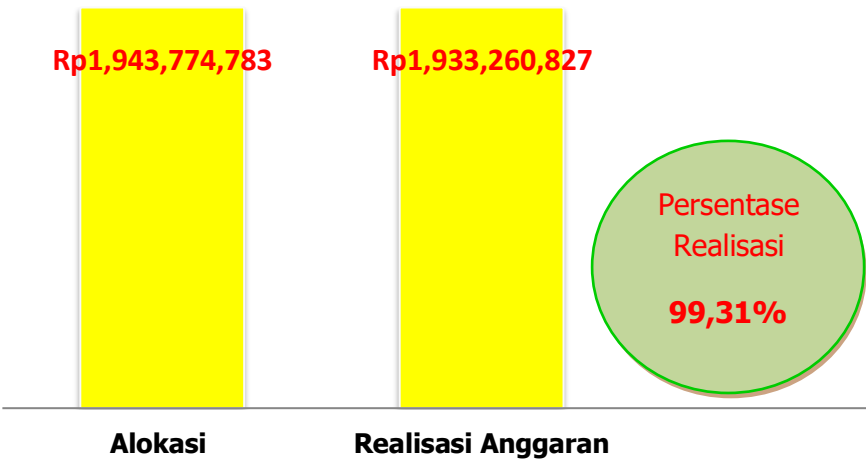
B. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penggunaan sumber daya finansial. Laporan akuntabilitas kinerja yang baik harus disertai pula laporan

akuntabilitas keuangan, sehingga pengukuran anggaran program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar didukung anggaran dari APBD yang kemudian di masukkan kedalam APBD Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024.

Chart 3.4
Alokasi Belanja Langsung dan Realisasi Anggaran BPBD Tahun 2024



Berikut uraian alokasi dan realisasi keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar terhadap kinerja yang dihasilkan pada tahun 2024 :

Tabel. 3.5
Nilai Efisiensi Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sasaran Strategi dan Indikator	Target	Realisasi	%	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	% Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebencanaan (Indeks Ketahanan Bencana)	0,43	0,48	111,62	284.346.304	284.332.428	99,19	12,43	Program Penanggulangan Bencana
Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran (Indeks Kepuasan Masyarakat)	100	100	100	471.115.389	465.615.389	98,83	-1,17	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota - Keg. Administrasi BMD pada Perangkat Daerah. Administrasi Kepegawaian PD,

								Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan BMD Penunjang Urusan PD, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan barang milik daerah.
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja (Predikat SAKIP Perangkat Daerah)	80	73,23	91,53	10.981.980	10.981.980	100	-8,5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota -Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan (Opini Pengelolaan Keuangan)	100	100	100	2.726.520	2.726.520	100	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota -Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
TOTAL			100,78	769.170.193	763.656.317	99,50	1,28	

Sumber : Data Laporan Realisasi Anggaran BPBD Tahun 2024

Mencermati rata-rata realisasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 sebesar 100,78%, maka hal ini menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 1,28%, sedangkan penggunaan anggaran yang terealisasi 99,50% yang telah mampu menghasilkan rata-rata kinerja 100,78%.


BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Polewali Mandar disusun dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *Good Governance*. Laporan AKIP ini juga memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024 dan Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2024.

Menindaklanjuti berbagai kebijakan yang yang tertuang dalam Visi, Misi dan Sasaran Renstra, maka pada tahun 2024 telah ditetapkan 2 Program dan 11 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan agar Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tersebut mencapai sasaran yang telah ditetapkan, telah pula ditetapkan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari 4 indikator yang ditetapkan, secara umum dapat dinyatakan telah dicapai dengan baik. Meskipun dalam pelaksanaan beberapa kegiatan terdapat kendala-kendala dalam pencapaian sasaran yang diinginkan.

Meskipun demikian, laporan ini dapat disusun sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditetapkan, serta disampaikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut pada tingkat atasan. Jika dalam penyusunan LAKIP ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dan saran dari berbagai pihak tetap diharapkan untuk kelancaran



pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pembangunan di masa yang akan datang.

LAMPIRAN

LAKIP BPBD 2024:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Polewali Mandar



LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA



Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Polewali Mandar



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Pameran Kelurahan Darma Kecamatan Polewali,
email : bpbd@polewamkab.go.id – Kode Pos.91314

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. H. AKSAN AMRULLAH, MM**
Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. Muhammad Ilham Borahima**
Jabatan : Pj.Bupati Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua,
Pj.Bupati Polewali Mandar,

Drs. Muhammad Ilham Borahima

Pihak Pertama,
Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah,

Drs. H. Aksan Amrullah, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19740306 199302 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi Kabupaten Polewali Mandar. Penilaian tersebut merupakan salah satu elemen dalam penyusunan peta kapasitas dan selanjutnya dapat memutakhirkan peta risiko bencana. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Dalam menghitung Indeks ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana tentu memperhatikan risiko bencana dengan melakukan perkuatan pada sisi perencanaan, pendanaan, pemeliharaan, rehabilitasi, dan pemantauan atau monitoring sehingga tingkat ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana dapat dicapai dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko.	Rata-Rata Persentase Prioritas 1 (Perkuatan Kebijakan dan kelembagaan), Prioritas 2 (Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu), Prioritas 3 (Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik), Prioritas 4 (Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana), Prioritas 5	BPBD Kabupaten Polewali Mandar

			(Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi), Prioritas 6 (Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana), Prioritas 7 (Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana) dibagi semua prioritas dikali 100%	
--	--	--	---	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
<u>Indeks Ketahanan Daerah dalam Menghadapi Bencana</u>	<u>0,43%</u>	<u>Capaian Tahun 2023 adalah 0,48% yang telah dilakukan verifikasi bertahap, dimulai oleh BPBD Provinsi Sulawesi Barat dan dilanjutkan dengan verifikasi oleh BNPB sesuai surat BNPB Nomor : B-20.30/BNPB/D-I/SS.01.03/01/2024 perihal Penyampaian Hasil IKD 2023 dan IRBI 2023</u>

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TABEL KINERJA
TAHUN 2024

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
1	Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks ketahanan daerah dalam menghadapi bencana	0,48%	0,43%
2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	BB	A
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	100%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik	Sangat Baik

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1,918,627,804	APBD
4	Penanggulangan Bencana	Rp 302,452,729	APBD
JUMLAH		Rp 2,221,080,533	APBD

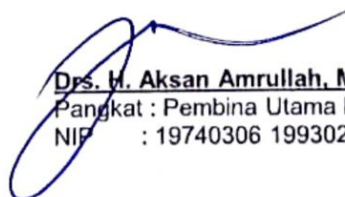
Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua,
Pj.Bupati Polewali Mandar,



Drs. Muhammad Ilham Borahima

Pihak Pertama,
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah,



Drs. H. Aksan Amrullah, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19740306 199302 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. Pameran Kelurahan Darma Kecamatan Polewali,
email : bbpd@polmankab.go.id - Kode Pos. 91314

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD SALEH, S. Sos**
Jabatan : **SEKRETARIS BPBD**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. H. AKSAN AMRULLAH, MM**
Jabatan : **KEPALA PELAKSANA BPBD**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua
Kepala Pelaksana BPBD,

Pihak Pertama
Sekretaris BPBD.


Drs. H. AKSAN AMRULLAH, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19740306 199302 1 001


MUHAMMAD SALEH, S. Sos
Pangkat : Pembina
Nip : 19660501 198911 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
I	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%
		Persentase tertib administrasi barang milik daerah	100%	100%
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	100%	100%
		Persentase tertib administrasi umum kantor	100%	100%
		Persentase pemenuhan kebutuhan BMD sesuai RKBMD	100%	100%
		Persentase ketersediaan jasa penunjang administrasi kantor sesuai standar dan prosedur	100%	100%
		Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD sesuai RKPBM	100%	100%
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	100%	100%

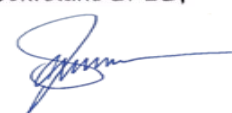
NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 10,981,980	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 1,456,601,053	APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 1,090,011	APBD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 12,265,500	APBD
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 210,974,639	APBD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 20,748,120	APBD
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 82,009,721	APBD
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 123,956,780	APBD
JUMLAH		Rp 1,918,627,804	APBD

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Pelaksana BPBD,

Pihak Pertama,
Sekretaris BPBD,


Drs. H. AKSAN AMRULLAH, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19740306 199302 1 001


MUHAMMAD SALEH, S. Sos
Pangkat : Pembina
NIP : 19660501 198911 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. Pameran Kelurahan Dama Kecamatan Polewali,
email : bpbd@polmankab.go.id - Kode Pos. 91314

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MARWAH, S. TP, M. SI**

Jabatan : **KA.SUB.BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MUHAMMAD SALEH, S. Sos**

Jabatan : **SEKRETARIS BPBD**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua
Sekretaris BPBD

MUHAMMAD SALEH, S. Sos

Pangkat : Pembina

Nip : 19660501 198911 1 002

Pihak Pertama
Ka.Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian

MARWAH, S. TP, M. SI

Pangkat : Penata

Nip : 19840924 200604 2 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

NO	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
I	Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%
1	Meningkatnya Tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan
II	Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaalan Perangkat Daerah	Persentase PNS Perangkat Daerah Yang Berkinerja Baik	100%	100%
2	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	40 Pasang	17 Pasang
III	Meningkatnya Tertib Administasi Umum Kantor	Persentase Tertib Administasi Umum Kantor	100%	100%
3	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket
4	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket
5	Terpenuhinya kebutuhan makan minum	Jumlah paket bahan logistik (makan minum) yang disediakan	508 Paket	508 Paket
6	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Paket	3 Paket
7	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen
8	Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	309 Laporan	309 Laporan
9	Terkelolanya Layanan SPBE Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan Sistem pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
IV	Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD	-	100%
10	Terpenuhinya kebutuhan mebeluer kantor	Jumlah paket mebel yang disediakan	-	1 Unit
11	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-	1 Unit

V	Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan prosedur	100%	100%
12	Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat	120 Surat	120 Surat
13	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi	3 Jenis	2 Jenis
14	Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor	Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih	1000 M'	1000 M'
VI	Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBM	100%	100%
15	Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8 Unit	8 Unit
16	Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	11 Unit	11 Unit

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 1,090,011	APBD
II	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 12,265,500	APBD
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp 1,054,500	APBD
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 11,276,490	APBD
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 15,352,000	APBD
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 4,224,849	APBD
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 1,440,000	APBD
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 167,186,800	APBD
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 10,440,000	APBD

IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
10	Pengadaan Mebel	Rp 7,785,540	APBD
11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 12,962,580	APBD
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 30,800,000	APBD
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 40,220,511	APBD
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 10,989,210	APBD
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 100,866,000	APBD
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 23,090,780	APBD
JUMLAH		Rp 451,044,771	APBD

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris BPBD,



MUHAMMAD SALEH, S. Sos

Pangkat : Pembina

NIP : 19660501 198911 1 002

Pihak Pertama,
Ka.Sub,Bag.Umum dan Kepegawaian



MARWAH, S.TP, M.Si

Pangkat : Penata

NIP : 19840924 200604 2 009



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. Pameran Kelurahan Dharma Kecamatan Polewali,
email : bpbd@polmankab.go.id - Kode Pos. 91314

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAHMATULLAH, SE**
Jabatan : **FUNGSIONAL PERENCANA**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MUHAMMAD SALEH, S. Sos**
Jabatan : **SEKRETARIS BPBD**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua
Sekretaris BPBD

MUHAMMAD SALEH, S. Sos

Pangkat : Pembina

Nip : 19660501 198911 1 002

Pihak Pertama
Fungsional Perencana

Rahmatullah, SE

Pangkat : Penata Tk. 1

Nip : 19800330 201101 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PELAPORAN

NO	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
I	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%
1	Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Perubahan Renstra yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu	-	-
		Jumlah Renja yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen
2	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen
3	Meningkatnya kualitas penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar	1 Dokumen	1 Dokumen
4	Meningkatnya kualitas Laporan kinerja perangkat Daerah	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah LPPD dan Laporan Urusan/ Fungsi Perangkat Daerah yang Tersusun sesuai Standar dan Tepat Waktu	1 Dokumen	1 Dokumen

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 2,285,160	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 3,703,320	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp 2,715,420	APBD
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 2,278,080	APBD
JUMLAH		Rp 10,981,980	APBD

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris BPBD.



MUHAMMAD SALEH, S. Sos
Pangkat : Pembina
NIP : 19660501 198911 1 002

Pihak Pertama,
Koordinator Sub Perencanaan dan Pelaporan



RAHMATULLAH, SE
Pangkat : Penata TA I
NIP : 19800330 201101 1 009



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. Pameran Kelurahan Dharma Kecamatan Polewali,
email : bpbd@polmankab.go.id - Kode Pos. 91314

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : **FUNGSIONAL KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MUHAMMAD SALEH, S. Sos**

Jabatan : **SEKRETARIS BPBD**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2023

Pihak Kedua
Sekretaris BPBD

Pihak Pertama
Fungsional Keuangan Pusat dan Daerah

MUHAMMAD SALEH, S. Sos

Pangkat : Pembina

Nip : 19660501 198911 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB KOORDINATOR KEUANGAN DAN VERIFIKASI

NO	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Persentase penyampalan Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%
1	Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	16 Orang	17 Orang
2	Meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil	1 Dokumen	1 Dokumen
3	Meningkatnya kualitas laporan keuangan berkala	Jumlah laporan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1,453,874,533	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 2,726,520	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp -	APBD
JUMLAH		Rp 1,456,601,053	APBD

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris BPBD.



MUHAMMAD SALEH, S.Sos

Pangkat : Pembina

NIP : 19660501 198911 1 002

Pihak Pertama,
Koordinator Sub Keuangan dan Verifikasi

Pangkat :
NIP :



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. Pameran Kelurahan Darna Kecamatan Polewali,
email : bpbd@polmankab.go.id - Kode Pos. 91314

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAIDIR, A. Md

Jabatan : KA. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. H. AKSAN AMRULLAH, MM

Jabatan : KEPALA PELAKSANA BPBD

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua
Kepala Pelaksana BPBD,

Pihak Pertama
Ka. Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan


Drs. H. AKSAN AMRULLAH, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19740306 199302 1 001


HAIDIR, A. Md

Pangkat : Pembina

Nip : 19670715 199003 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
1	Optimalnya Mitigasi, Tanggap Darurat dan Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah aparaturnya dan warga negara yang ikut Sosialisasi dan Pelatihan	100%	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
1	KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	Rp. 23,187,004	APBD
2	KEGIATAN PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	Rp. 10,250,610	APBD
Jumlah		Rp. 33,437,614	APBD

Polewali, 23 Februari 2024

PIhak Kedua
Kepala Pelaksana BPBD


Drs. H. AKSAN AMRULLAH, MM
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19740306 199302 1 001

PIhak Pertama
Ka Bid Pencegahan dan Kesiapsiagaan


RAJIB A. Md
Pangkat Pembina
NIP. 19670715 199003 1 011



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. Pameran Kelurahan Dharma Kecamatan Polewali,
email : bpbd@polmankab.go.id - Kode Pos. 91314

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUSNI JAYA, S. Sos
Jabatan : KOORDINATOR SUB KEG. KESIAPSIAGAAN

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : HAIDIR, A. Md
Jabatan : KA. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua
Ka. Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan

HAIDIR, A. Md
Pangkat : Pembina
Nip : 19670715 199003 1 011

Pihak Pertama
Koordinator Sub Kegiatan
Kesiapsiagaan

YUSNI JAYA, S. Sos
Pangkat : Penata Tk. 1
Nip : 19760218 200312 1 008


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB KEGIATAN KESIAPSIAGAAN**

NO	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
I	Meningkatnya Mutu Layanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Desa Rawan Bencana Yang Mendapatkan Informasi Rawan Bencana	-	1 Desa
1	Meningkatnya masyarakat yang memahami setiap jenis ancaman bencana	Jumlah masyarakat yang mengikuti Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	-	30 Orang
II	Meningkatnya Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Layanan Siaga Bencana	2 Jenis	1 Jenis
1	Terlaksananya Pelatihan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparaturnya yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	165 Orang	-
2	Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga, maupun petugas unit	42 Unit	44 Unit
3	Terlaksananya Gladi/Simulasi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah aparaturnya dan warga negara yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 Orang	-
III	Meningkatnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1 Dok	1 Dok
1	Tersedianya Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana dan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah data dan informasi kebencanaan yang tersedia	1 Dok	1 Dok


NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I	KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA		
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Rp. 23,187,004	APBD
II	KEGIATAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA		
1	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp. 11,162,160	APBD
JUMLAH		Rp. 34,349,164	APBD

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua,
Ka. Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan


HAIDIR, A. Md
Pangkat : Pembina
NIP : 19670715 199003 1 011

Pihak Pertama,
Koordinator Sub. Kegiatan Kesiapsiagaan


YUSNI JAYA, S. Sos
Pangkat : Penata Tk. 1
NIP : 19760218 200312 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. Pameran Kelurahan Dama Kecamatan Polewali,
email : bpbd@polmankab.go.id - Kode Pos. 91314

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANWAR KAMARUDDIN, S. Sos**
Jabatan : **KA. BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs H. AKSAN AMRULLAH, MM**
Jabatan : **KEPALA PELAKSANA BPBD**

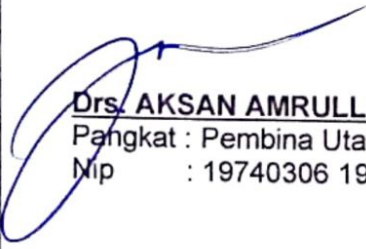
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua
Kepala Pelaksana BPBD

Pihak Pertama
Ka.Bid. Kedaruratan dan Logistik


Drs. AKSAN AMRULLAH, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19740306 199302 1 001


ANWAR KAMARUDDIN, S. Sos
Pangkat : Pembina
Nip : 19680520 199103 1 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
1	Optimalnya Mitigasi, Tanggap Darurat dan Penanggulangan Bencana	Waktu Tanggap Darurat Setelah Kejadian	72 Jam	72 Jam

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
1	KEGIATAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	Rp. 230,274,410	APBD
JUMLAH		Rp. 230,274,410	APBD

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Pelaksana BPBD,

Pihak Pertama,
Ka.Bid.Kedaruratan dan Logistik

Drs. H. AKSAN AMRULLAH, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19740306 199302 1 001

ANWAR KAMARUDDIN, S. Sos
Pangkat : Pembina
NIP : 19680520 199103 1 009



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. Pameran Kelurahan Darna Kecamatan Polewali,

email : bpbd@polmankab.go.id - Kode Pos. 91314

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SULQIPLI, S. Sos**

Jabatan : **KOORDINATOR SUB KEG. KEDARURATAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ANWAR KAMARUDDIN, S. Sos**

Jabatan : **KA. BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua
Ka. Bid. Kedaruratan dan Logistik

ANWAR KAMARUDDIN, S. Sos

Pangkat : Pembina

Nip : 19680520 199103 1 009

Pihak Pertama
Koordinator Sub Kegiatan
Kedaruratan

SULQIPLI, S. Sos

Pangkat : Penata

Nip : 19731231 200604 1 103

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB KEGIATAN KEDARURATAN**

NO	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
I	Optimalnya Layanan Tanggap Darurat Bencana	Jumlah Layanan Tanggap Darurat Bencana	1 Jenis	1 Jenis
1	Tersedianya Data Laporan Kejadian Bencana	Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	143 Laporan	100 Laporan

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I	KEGIATAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA		
1	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Rp. 230,274,410	APBD
JUMLAH		Rp. 230,274,410	APBD

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua,
Ka. Bid. Kedaruratan dan Logistik


ANWAR KAMARUDDIN, S. Sos
Pangkat : Pembina
NIP : 19680520 199103 1 009

Pihak Pertama,
Koordinator Sub Kegiatan Kedaruratan


SULQILUL, S. Sos
Pangkat : Penata
NIP : 19731231 200604 1 103



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. Pameran Kelurahan Dharma Kecamatan Polewali,
email : bpbd@polmankab.go.id - Kode Pos. 91314

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MAKMUR, S. Sos**

Jabatan : **KA. BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. H. AKSAN AMRULLAH, MM**

Jabatan : **KEPALA PELAKSANA BPBD**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua
Kepala Pelaksana BPBD

Pihak Pertama
Ka.Bid.Rehabilitasi dan Rekonstruksi


Drs. H. AKSAN AMRULLAH, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19740306 199302 1 001


MAKMUR, S. Sos

Pangkat : Pembina

Nip : 19750723 199803 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
1	Optimalnya Mitigasi, Tanggap Darurat dan Penanggulangan Bencana	Persentase Pascabencana yang Tertangani	100%	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
1	KEGIATAN PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	Rp. 27,578,545	APBD
JUMLAH		Rp. 27,578,545	APBD

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Pelaksana BPBD,

Pihak Pertama,
Ka.Bid.Rehabilitasi dan Rekonstruksi


Drs. H. AKSAN AMRULLAH, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19740306 199302 1 001


MAKMUR, S. Sos
Pangkat : Pembina
NIP : 19750723 199803 1 005



LAMPIRAN 2

PENGUKURAN KINERJA



Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Polewali Mandar

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019-2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN KERJA PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Persentase Desa Siaga Bencana	Persen	$\frac{\text{Jumlah desa yang memiliki tenaga siaga bencana}}{\text{Jumlah desa rawan bencana yang disasar selama 5 tahun}} \times 100$	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Waktu Tanggap Darurat Setelah Kejadian	Jam	Waktu standar tanggap darurat setelah kejadian yang digunakan	Bidang Kedaruratan dan Logistik
		Persentase Pasca Bencana Yang Tertangani	Persen	$\frac{\text{Jumlah kejadian bencana yang tertangani}}{\text{Jumlah kejadian bencana yang terjadi selama 5 tahun}} \times 100$	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	Hasil Review Inspektorat atas Implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review Kinerja Predikat SAKIP meliputi : - AA > 90 - 100 : Sangat Memuaskan - A > 90 - 100 : Memuaskan - BB > 70 - 80 : Sangat Baik - B > 60 - 70 : Baik - CC > 50 - 60 : Cukup - C > 30 - 50 : Kurang - D > 0 - 30 : Sangat Kurang Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. SAKIP mendukung terciptanya good governance untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Sekretariat BPBD
		Opini Laporan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini	Diperoleh dengan mereview kinerja pengelolaan aset dan keuangan serta tersusunnya dokumen terkait aset dan laporan keuangan pada akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu	Sekretariat BPBD
		Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder	Indeks	$\frac{\text{Jumlah Seluruh IKP Layanan} \times 100}{\text{Jumlah Layanan Publik OPD Yang Dilakukan Survey Kepuasan}}$ Nilai-nilai efesiensi, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan merupakan syarat utama dalam pelayanan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Sekretariat BPBD

 DA A PELAKSANA BPBD,
AKSAN AMRULLAH, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19740306 199302 1 001



LAMPIRAN 3

REALISASI ANGGARAN BPBD TAHUN 2024



Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Polewali Mandar

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN BPBD
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		PROGRAM	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Sangat Baik	1,659,428,479		1,648,928,399			
						Prediksi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Predikat	A						
						Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini	WTP						
1				Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai Standar dan Tepat Waktu	Persen	100%	10,981,980	100%	10,981,980			
1				Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	3 Dok	2,285,160	3 Dok	2,285,160			
2					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	2 Dok	3,703,320	2 Dok	3,703,320			
3					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok	1 Dok	2,715,420	1 Dok	2,715,420			
4					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standat dan Tepat Waktu	Dok	1 Dok	2,278,080	1 Dok	2,278,080			
						Jumlah LPPD dan Laporan Urusan/ Fungsi Perangkat Daerah yang Tersusun sesuai Standar dan Tepat Waktu	Dok	1 Dok		1 Dok	-			
2				Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu	Persen	100%	1,177,331,110	100%	1,172,331,030			
5				Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bln	232 Org/Bln	1,174,604,590	232 Org/Bln	1,169,604,510			
6					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap	1 Lap	2,726,520	1 Lap	2,726,520			

3				Kegiatan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah	Persen	100%	1,090,011	100%	1,090,011			
7				Sub Kegiatan	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lap	4 Lap	1,090,011	4 Lap	1,090,011			
4				Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase PNS Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik	Persen	100%	12,265,500	100%	12,265,500			
8				Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	17 Paket	12,265,500	17 Paket	12,265,500			
5				Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administasi Umum Kantor	Persen	100%	213,772,219	100%	208,272,219			
9				Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1,054,500	1 Paket	1,054,500			
10					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3 Paket	16,776,490	2 Paket	11,276,490			
11					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan Minum Yang Tersedia	Paket	508 Paket	18,360,000	508 Paket	18,360,000			
12					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Dsedikan	Paket	3 Paket	11,368,429	3 Paket	11,368,429			
13					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	309 Lap	155,772,800	309 Lap	155,772,800			
14					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dok	4 Dok	10,440,000	4 Dok	10,440,000			
6				Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD	Persen	100%	5,112,660	100%	5,112,660			
15				Sub Kegiatan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Paket	1 Paket	5,112,660	1 Paket	5,112,660			
7				Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan prosedur	Paket	100%	68,153,969	125%	68,153,969			
16				Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap	130 Lap	24,000,000	169 Lap	24,000,000			
17					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	12 Lap	33,164,759	12 Lap	33,164,759			
18					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	12 Lap	10,989,210	12 Lap	10,989,210			
8				Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMd	Persen	100%	170,721,030	100%	170,721,030			

19				Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8 Unit	147,630,250	8 Unit	147,630,250			
20					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	13 Unit	23,090,780	13 Unit	23,090,780			
II				PROGRAM	PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa Siaga Bencana	Persen	90%	284,346,304		284,332,428			
						Waktu Tanggap Darurat Setelah Kejadian	Jam	72 Jam						
						Persentase Pascabencana Yang Tertangani	Persen	100%						
9				Kegiatan	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	Org	30 Org	16,242,844	30 Orang	16,242,844			
21				Sub Kegiatan	Sosialisasi, Komunkasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kab/Kota yang memperoleh Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Org	30 Orang	16,242,844	30 Orang	16,242,844			
10				Kegiatan	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	0%	-	0%	-			
				Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Unit	0 Unit	-	0 Unit	-			
11				Kegiatan	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Bencana	Org	100 Orang	230,274,305	86 Orang	230,274,305			
22				Sub Kegiatan	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Lap	100 Lap	230,274,305	86 Lap	230,274,305			
12				Kegiatan	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Dok	16 Dok	37,829,155	16 Dok	37,815,279			
23				Sub Kegiatan	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan Yang Tersedia	Dok	12 Dok	10,250,610	12 Dok	10,250,610			

24					Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yg dilegalkan	Dok	4 Dok	27,578,545	4 Dok	27,564,669			
					TOTAL ANGGARAN				1,943,774,783		1,933,260,827			



LAMPIRAN 4

POHON KINERJA BPBD

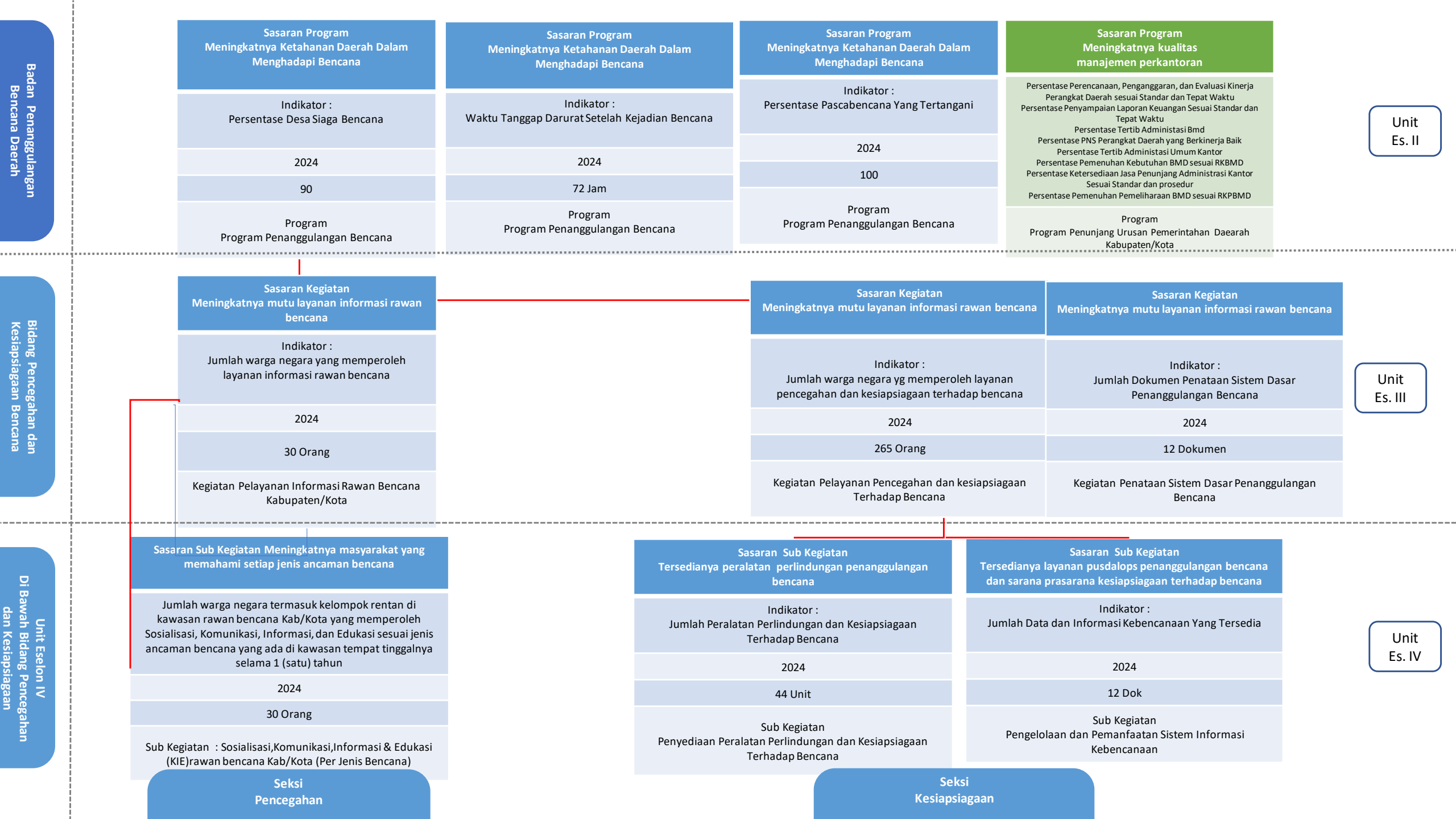
TAHUN 2024

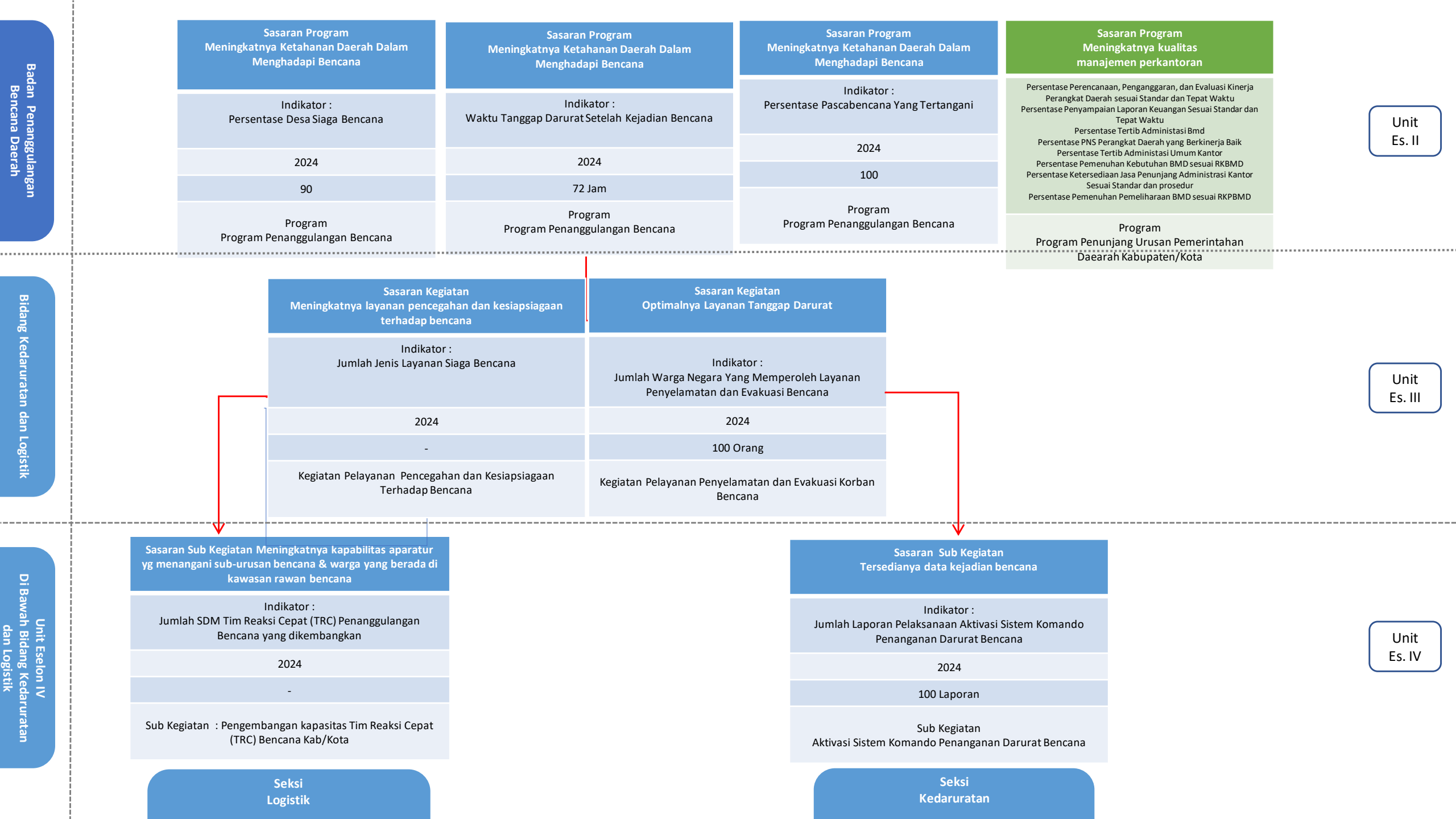


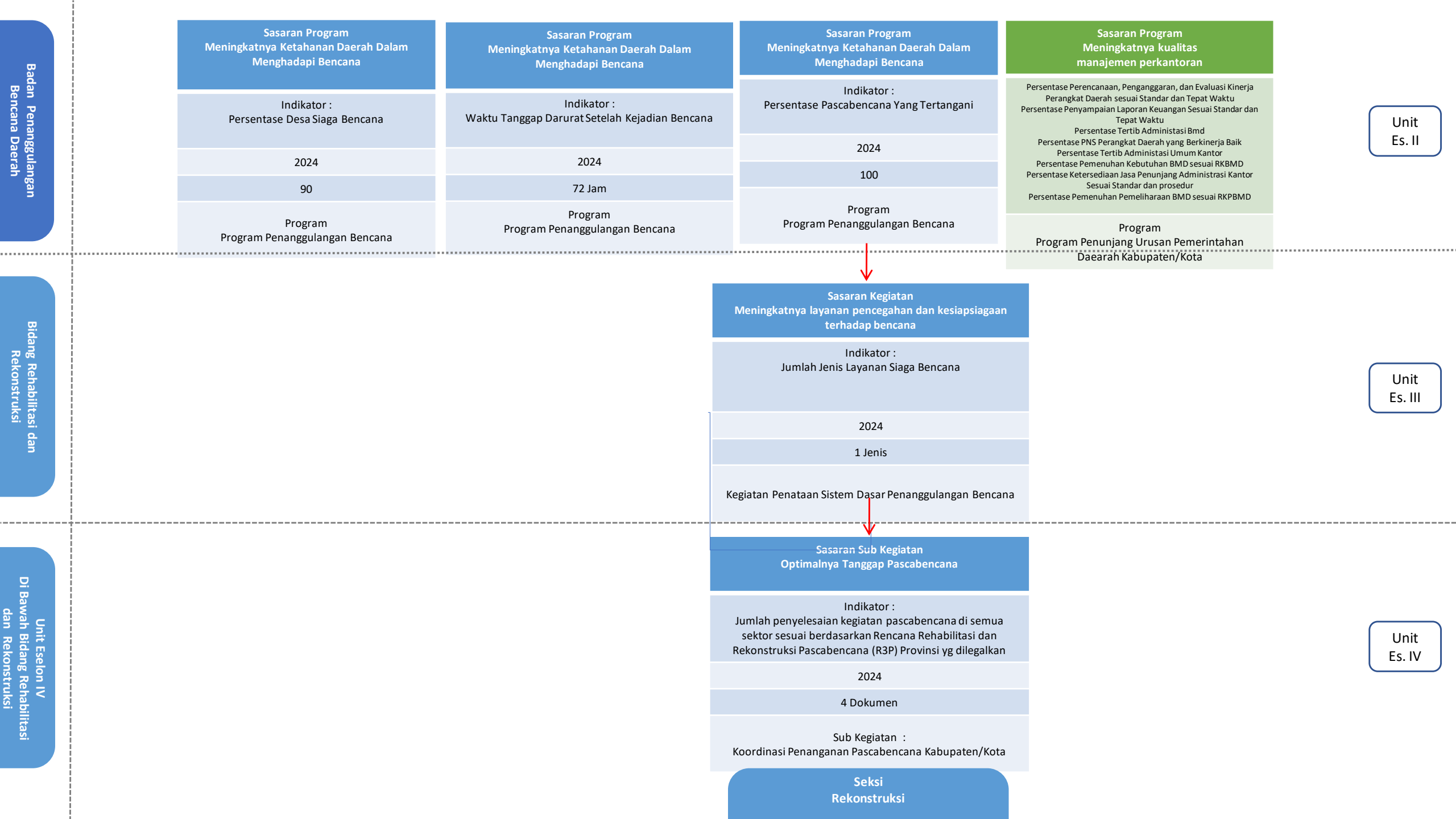
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Polewali Mandar

**Pemerintah Kabupaten
Polewali Mandar**

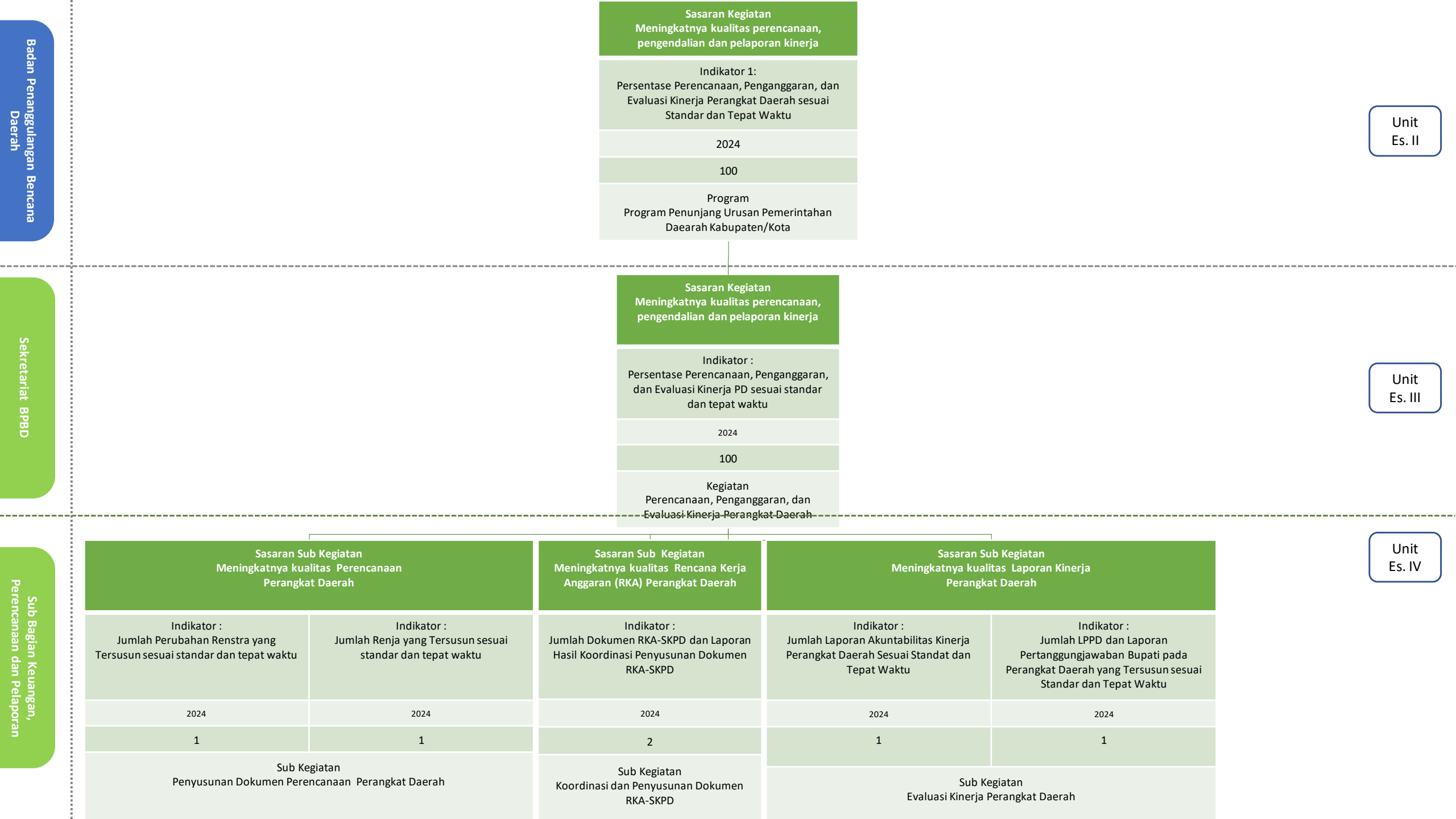


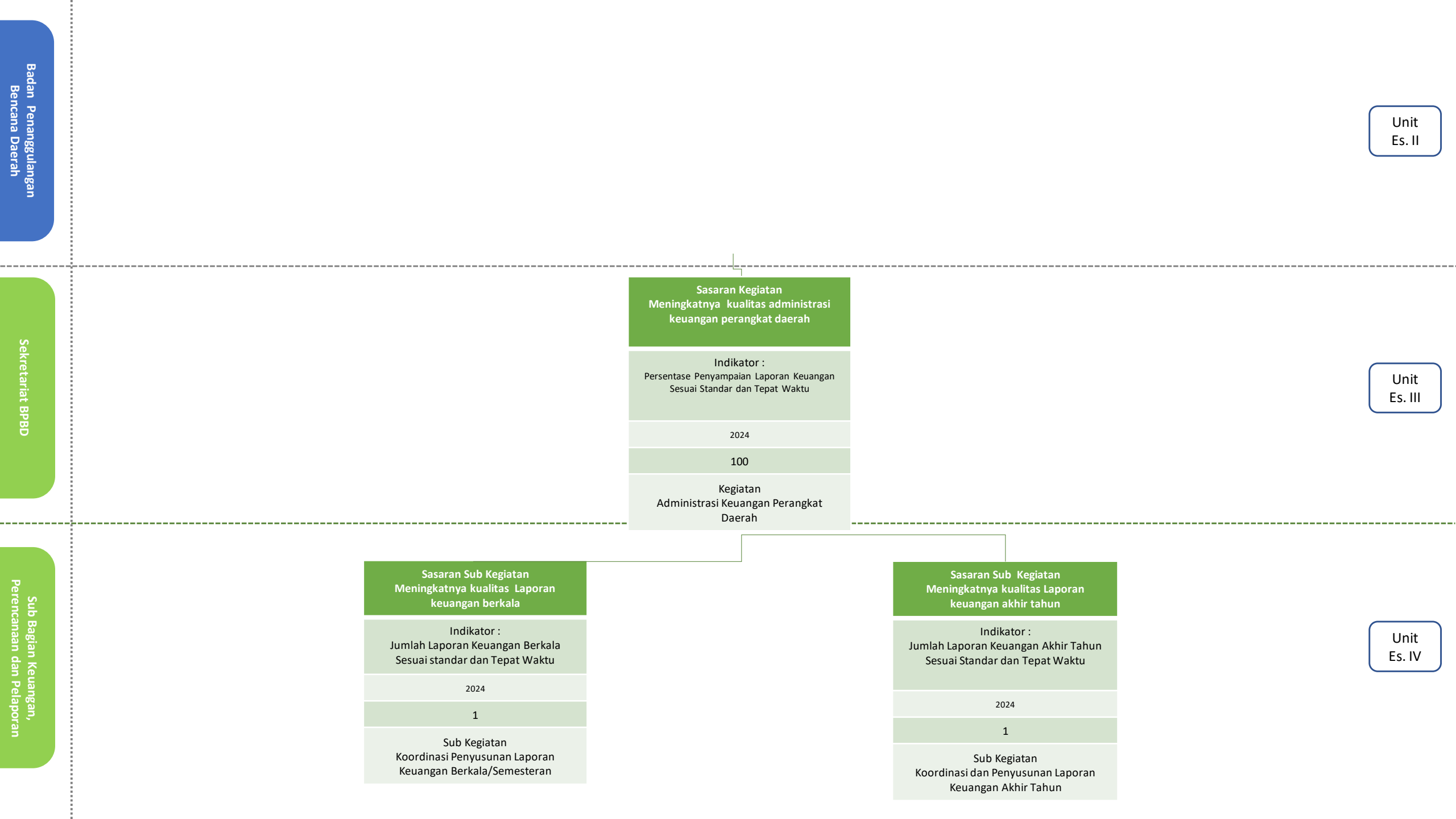




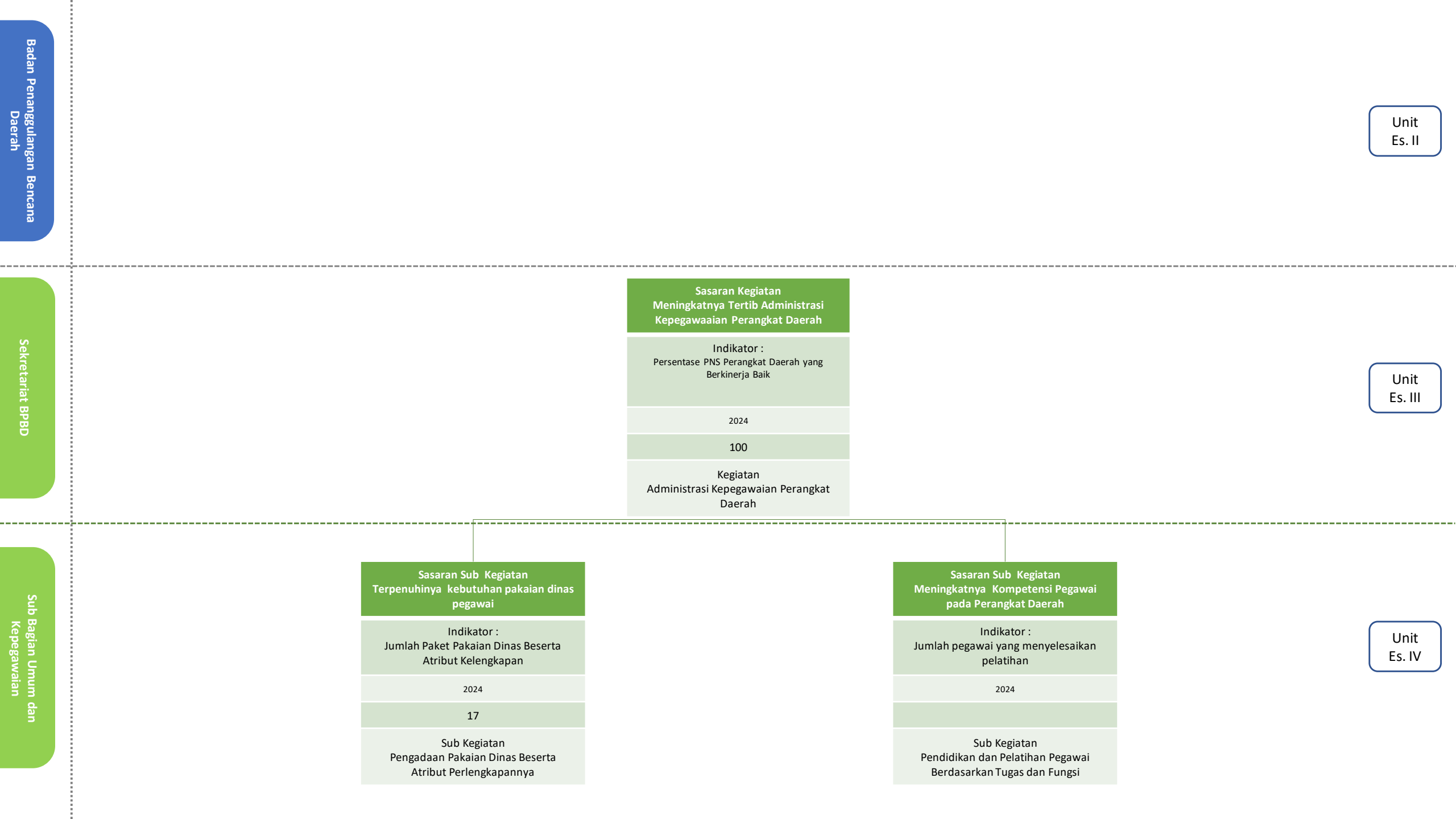


Badan penanggulangan Bencana Daerah	Sasaran Program Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana		Sasaran Program Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana		Sasaran Program Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana		Sasaran Program Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran		Unit Es. II
	Indikator : Persentase Desa Siaga Bencana		Indikator : Waktu Tanggap DaruratSetelah Kejadian Bencana		Indikator : Persentase Pascabencana Yang Tertangani		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Tertib Administrasi Bmd Persentase PNS Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor Persentase Pemenuhan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan prosedur Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMd		
	2024		2024		2024				
	90		72 Jam		100				
	Program Program Penanggulangan Bencana		Program Program Penanggulangan Bencana		Program Program Penanggulangan Bencana		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Sekretariat BPBD	Sasaran Kegiatan Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja		Sasaran Kegiatan Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah		Sasaran Kegiatan Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		Sasaran Kegiatan Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah		Unit Es. III
	Indikator : Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai Standar dan Tepat Waktu		Indikator : Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu		Indikator : Persentase Tertib Administasi BMD		Indikator : Persentase PNS Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik		
	2024		2024		2024		2024		
	100		100		100		100		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Kegiatan Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah		
	Sasaran Kegiatan Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor		Sasaran Kegiatan Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda		Sasaran Kegiatan Meningkatnya Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor		Sasaran Kegiatan Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda		
	Indikator : Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor		Indikator : Persentase Pemenuhan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD		Indikator : Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan prosedur		Indikator : Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMd		
	2024		2024		2024		2024		
	100		100		100		100		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

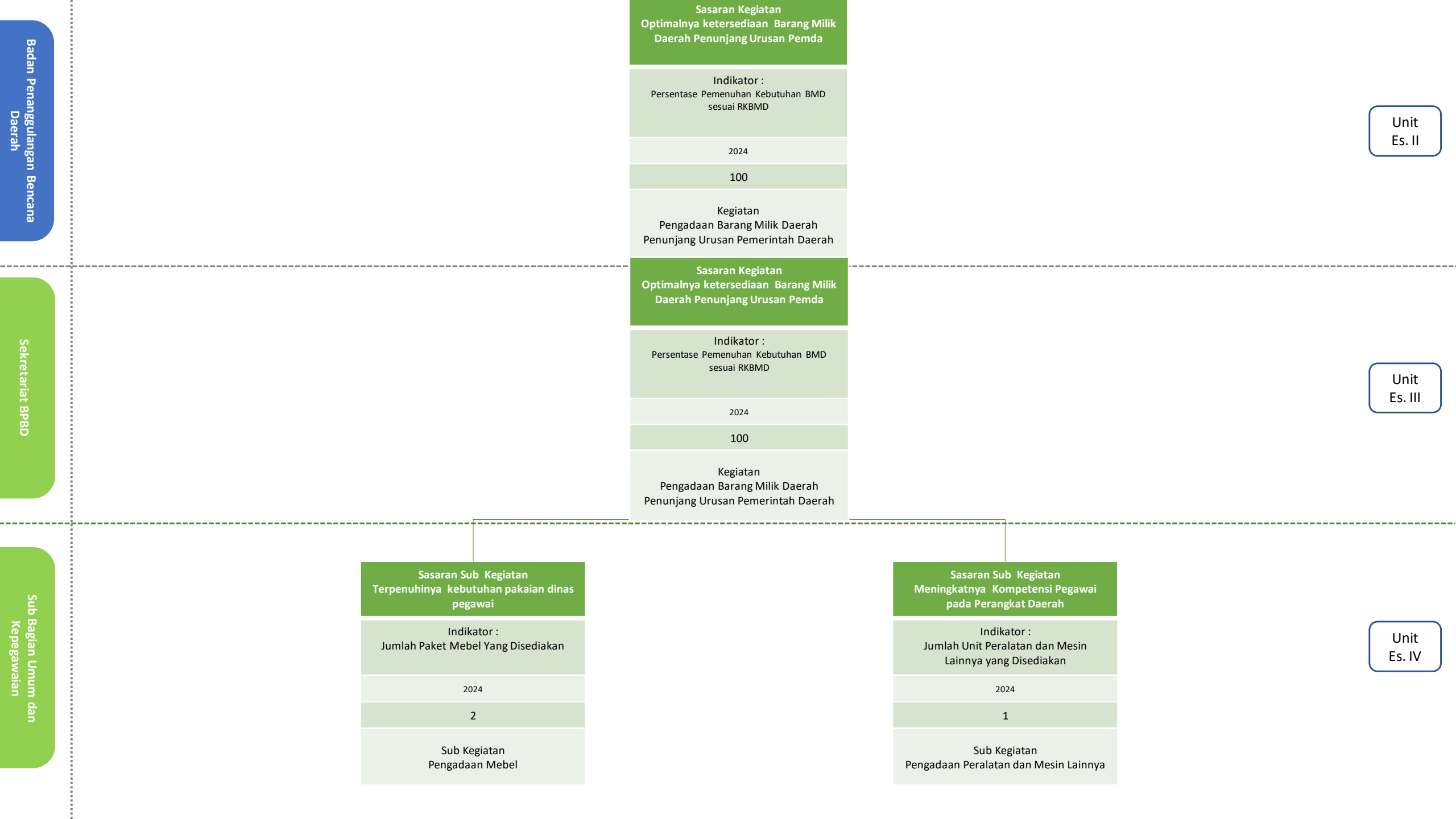


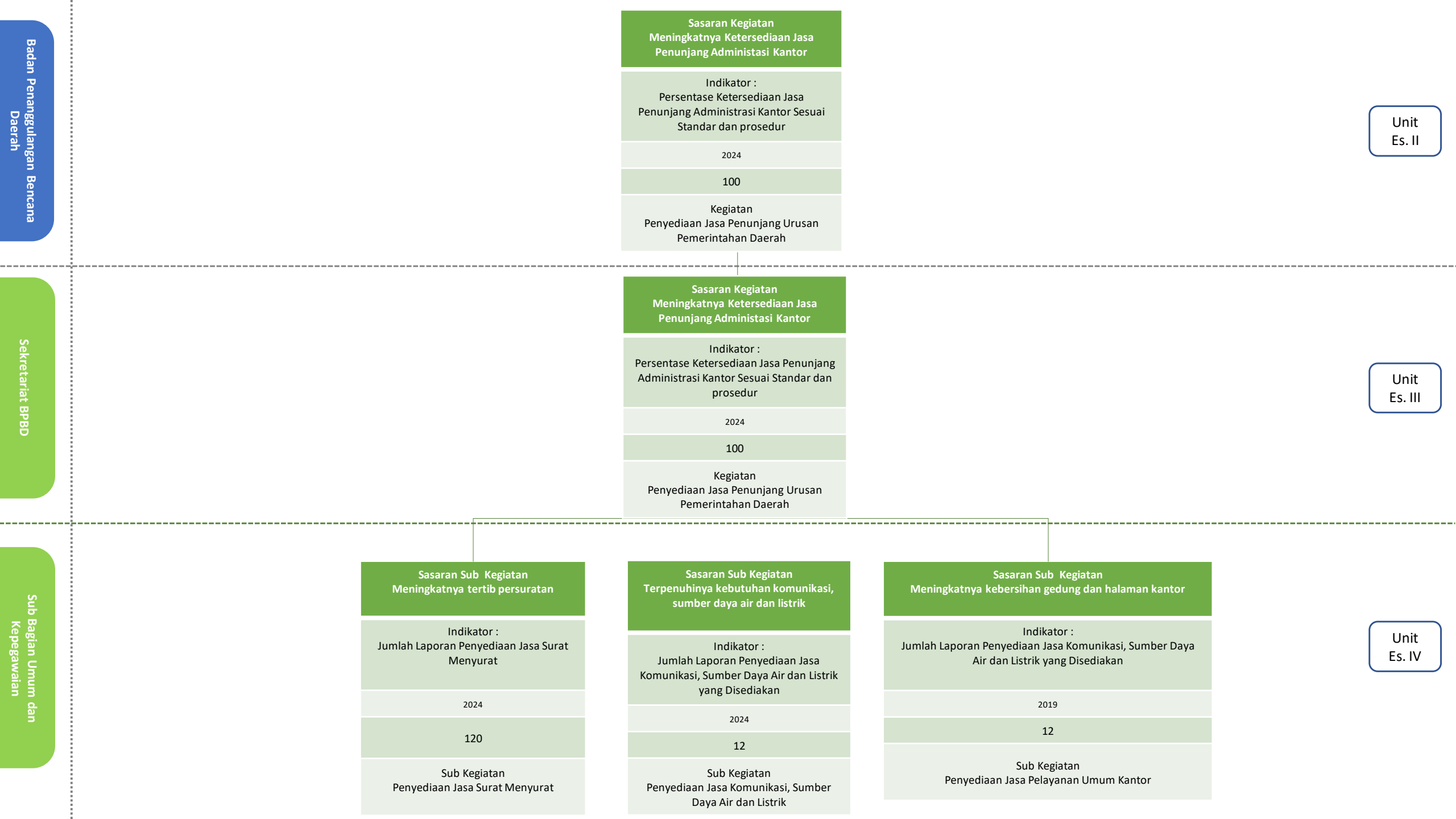


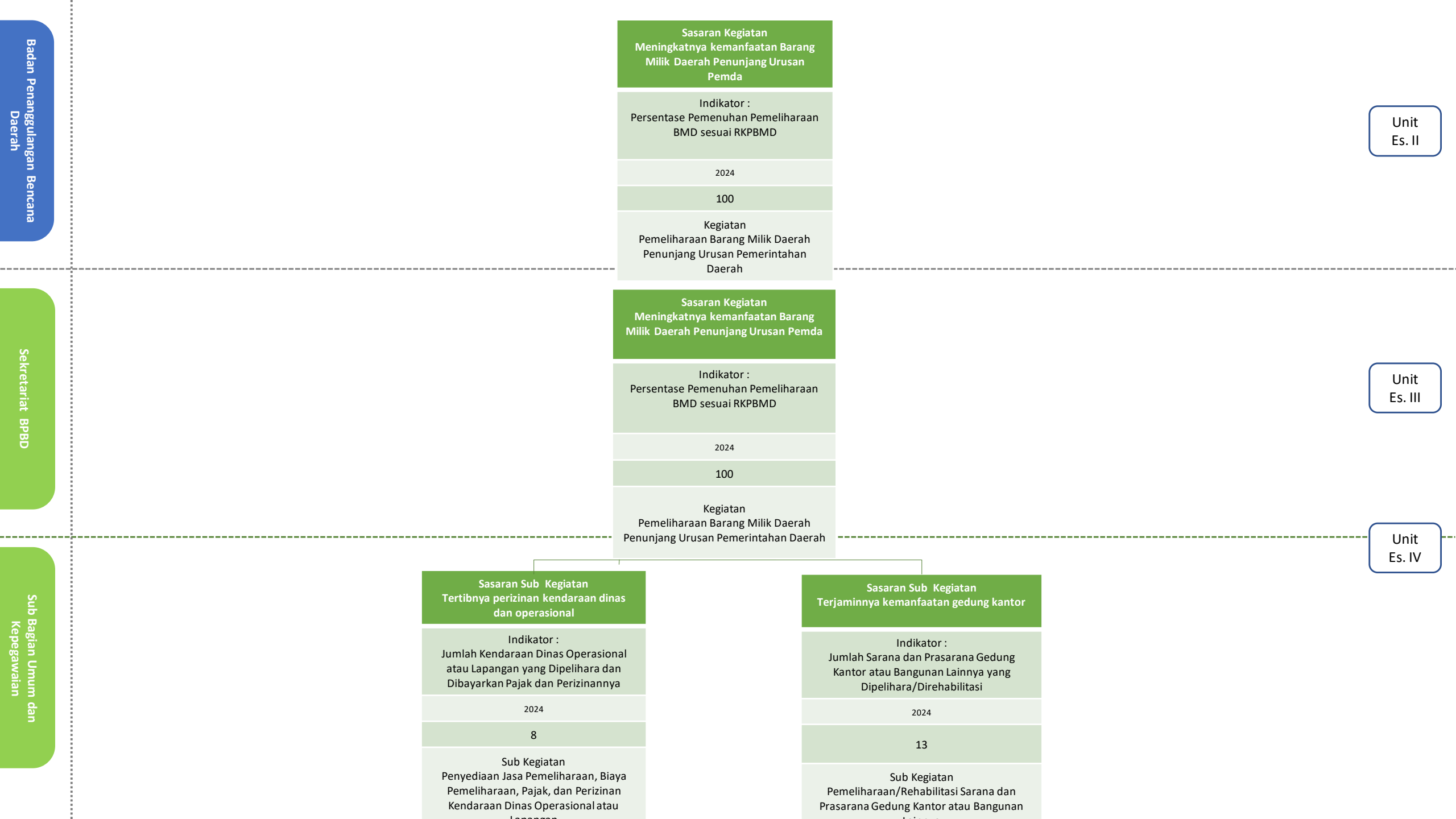




Badan penanggulangan Bencana Daerah							Unit Es. II	
	Sasaran Kegiatan Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor							
	Indikator : Persentase Tertib Administasi Umum Kantor							
	2024							
	100							
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah							
Sekretariat BPBD	Sasaran Kegiatan Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor						Unit Es. III	
	Indikator : Persentase Tertib Administasi Umum Kantor							
	2024							
	100							
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah							
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian							Unit Es. IV	
	Sasaran Sub Kegiatan Terpenuhiya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan	Sasaran Sub Kegiatan Terpenuhiya kebutuhan alat rumah tangga	Sasaran Sub Kegiatan Terpenuhiya kebutuhan makan minum	Sasaran Sub Kegiatan Terpenuhiya kebutuhan cetak dan penggandaan	Sasaran Sub Kegiatan Terpenuhiya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah	Sasaran Sub Kegiatan Terkelolanya Layanan SPBE Perangkat Daerah	Sasaran Sub Kegiatan Terpenuhiya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	
	Indikator : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Indikator : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indikator : Jumlah Makan Minum yang Tersedia	Indikator : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Dsediakan	Indikator : Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Indikator : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Indikator : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	
	1	3	508	3	12	4	309	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor yg disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	









LAMPIRAN 5

LAPORAN MONEV RENCANA AKSI TAHUN 2024



Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Polewali Mandar

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

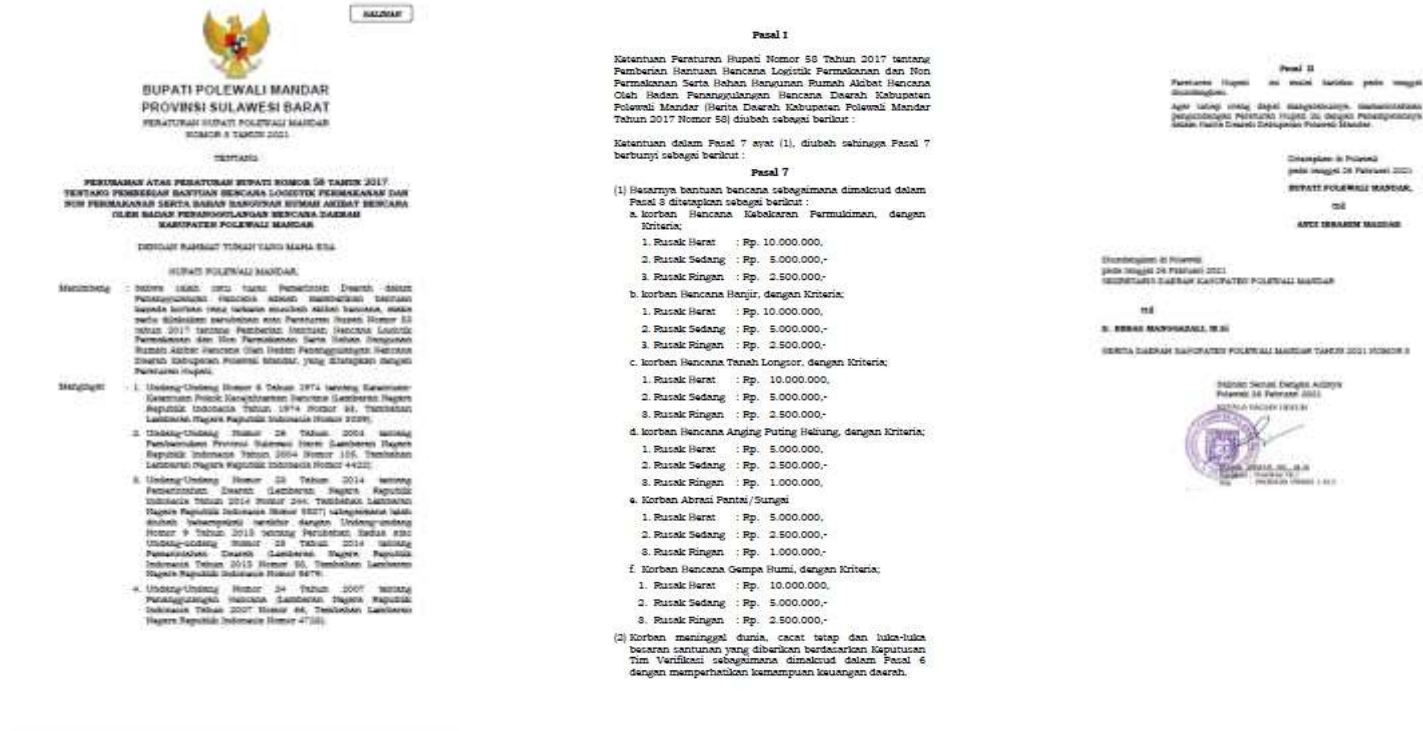


DOKUMENTASI KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024

ASPEK KEMASYARAKATAN

**INDIKATOR : KEBIJAKAN MITIGASI DAN
PENANGGULANGAN BENCANA (Antara Lain
Penanganan PMK, Longsor, Banjir, dan
Kebakaran)**

A. ADANYA KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERKAIT MITIGASI DAN PENANGGULANGAN BENCANA



Adaya Regulasi Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 Terkait Pemberian Bantuan Logistik Permukiman dan Non Permukiman serta Bahan Bangunan Rumah Akibat Bencana

REKAPITULASI BANTUAN KORBAN BENCANA



DATA VERIFIKASI BANGUNAN/HUNIAN AKIBAT BENCANA ALAM
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2024



DATA REKAPITULASI KEJADIAN BENCANA

Data Bencana Periode Bulan 1 Januari s.d Bulan 5 September 2024

No	NAMA KK	NIK	Jenis Kelamin		KECAMATAN	DESA / KEL	TANGGAL KEJADIAN	JENIS BENCANA	KATEGORI KERUSAKAN			Jumlah Bantuan
			L	P					RB	RS	RR	
1	SARUDDIN	7604011502930004	√		Tinambung	Sepabatu	12 Desember 2023	Kebakaran Permukiman	√	-	-	Rp 10,000,000.00
2	RUSLI	7604020107630164	√		Campalagian	Botto	13 Desember 2023	Angin Puting Beliung	-	-	√	Rp 1,000,000.00
3	ABD. MAJID	7604203251176001	√		Wonomulyo	Sidorejo	14 Desember 2023	Kebakaran Permukiman	√	-	-	Rp 10,000,000.00
4	NURHAYATI	7604027112670292		√	Campalagian	Katumbangan	18 Desember 2023	Kebakaran Permukiman	√	-	-	Rp 10,000,000.00
5	SALEH	7604110107850018	√		Tinambung	Lekopadis	14 Janauri 2024	Angin Puting Beliung	-	√	-	Rp 2,500,000.00
6	HARUNA	7604132211890002	√		Anreapi	Duampanua	14 Janauri 2024	Angin Puting Beliung	-	√	-	Rp 2,500,000.00
7	CUDING	7604071012690001	√		Tapango	Riso	19 Janauri 2024	Angin Puting Beliung	-	√	-	Rp 2,500,000.00
8	NURLELA	7604166609810001		√	Campalagian	Parappe	19 Janauri 2024	Angin Puting Beliung	√	-	-	Rp 5,000,000.00
9	SUDRIMAN	7604031112750186	√		Wonomulyo	Banuabaru	19 Janauri 2024	Kebakaran Permukiman	√	-	-	Rp 10,000,000.00
10	YAHYA	7604030107770450	√		Wonomulyo	Banuabaru	19 Janauri 2024	Kebakaran Permukiman	√	-	-	Rp 10,000,000.00
11	ANSAR	7604030506790021	√		Wonomulyo	Banuabaru	19 Janauri 2024	Kebakaran Permukiman	√	-	-	Rp 10,000,000.00

11	ANSAR	7604030506790021	√		Wonomulyo	Banuabaru	19 Januari 2024	Kebakaran Permukiman	√	-	-	Rp	10,000,000.00
12	MIDA	7604034107670578		√	Wonomulyo	Banuabaru	19 Januari 2024	Kebakaran Permukiman	-	-	√	Rp	2,500,000.00
13	BANDRING	7604034107550353		√	Wonomulyo	Galeso	26 Januari 2024	Kebakaran Permukiman	√	-	-	Rp	10,000,000.00
14	KUDDING	7604033112670107	√		Wonomulyo	Galeso	26 Januari 2024	Kebakaran Permukiman	√	-	-	Rp	10,000,000.00
15	MULIADI	7604100000000000	√		Wonomulyo	Galeso	26 Januari 2024	Kebakaran Permukiman	√	-	-	Rp	10,000,000.00
16	AMMAN	7604032708800011	√		Wonomulyo	Galeso	26 Januari 2024	Kebakaran Permukiman	-	√	-	Rp	5,000,000.00
17	DARWIS	7604121605870004		√	Balanipa	Tammangalle	6 Februari 2024	Angin Puting Beliung	-	√	-	Rp	2,500,000.00
18	KECCUNG	7604120701690100	√		Balanipa	Tammangalle	6 Februari 2024	Angin Puting Beliung	-	√	-	Rp	2,500,000.00
19	SALEH	7604023112840069	√		Campalagian	Sumarrang	10 Februari 2024	Kebakaran Permukiman	-	√	-	Rp	5,000,000.00
20	ASIA	7604017112432016		√	Tinambung	Sepabatu	13 Januari 2024	Angin Puting Beliung	-	-	√	Rp	1,000,000.00
21	NURSIHAH	7604015006760004		√	Tinambung	Sepabatu	13 Januari 2024	Angin Puting Beliung	-	-	√	Rp	1,000,000.00
22	AMIRULLAH	7604141212920006	√		Matakali	Indu Makkombong	10 Februari 2024	Kebakaran Permukiman	-	√	-	Rp	5,000,000.00
23	CALE		√		Tapango	Kurrak	31 Maret 2024	Kebakaran Permukiman	√	-	-	Rp	10,000,000.00
24	RAYHAN NAHAR		√		Campalagian	Parappe	3 April 2024	Angin Puting Beliung	-	√	-	Rp	2,500,000.00
25	SAIR		√		Campalagian	Sumarrang	8 April 2024	Kebakaran Permukiman	√	-	-	Rp	10,000,000.00
26	MUH. BASIR		√		Campalagian	Katumbangan	12 April 2024	Angin Puting Beliung	-	√	-	Rp	2,500,000.00
27	JUNAIDI IDRIS		√		Matakali	Patampanua	16 April 2024	Kebakaran Permukiman	-	-	√	Rp	2,500,000.00
28	RUSTAM		√		Polewali	Madatte	4 Mei 2024	Kebakaran Permukiman	√	-	-	Rp	10,000,000.00
29	ABD. JALIL		√		Polewali	Madatte	4 Mei 2024	Kebakaran Permukiman	√	-	-	Rp	10,000,000.00
30	NUR HADDAD		√		Mapilli	Mapilli	5 Mei 2024	Kebakaran Permukiman	√	-	-	Rp	10,000,000.00
31	Hj. SAPINA			√	Mapilli	Mapilli	5 Mei 2024	Kebakaran Permukiman	√	-	-	Rp	10,000,000.00
32	MARAWIS		√		Mapilli	Mapilli	5 Mei 2024	Kebakaran Permukiman	-	-	√	Rp	2,500,000.00
33	AMIR		√		Limboro	Napo	8 Mei 2024	Kebakaran Permukiman	-	-	√	Rp	2,500,000.00
34	ABD. RASYID		√		Limboro	Napo	8 Mei 2024	Kebakaran Permukiman	-	-	√	Rp	2,500,000.00
35	HASBI		√		Matakali	Pasiang	11 Mei 2024	Kebakaran Permukiman	-	√	-	Rp	5,000,000.00
36	HANAFI		√		Matakali	Patampanua	15 Mei 2024	Kebakaran Permukiman	√	-	-	Rp	10,000,000.00
37	SALAM		√		Mapilli	Rappang Barat	27 Mei 2024	Kebakaran Permukiman	√	-	-	Rp	10,000,000.00

38	YUDIANTO		√		Tinambung	Tangga-tangga	12 Juli 2024	Kebakaran Permukiman	√	-	-	Rp	10,000,000.00
39	SAIPUL		√		Tinambung	Tangga-tangga	12 Juli 2024	Kebakaran Permukiman	√	-	-	Rp	10,000,000.00
40	TUBI		√		Tinambung	Tangga-tangga	12 Juli 2024	Kebakaran Permukiman	√	-	-	Rp	10,000,000.00
41	AISYAH			√	Tinambung	Tangga-tangga	12 Juli 2024	Kebakaran Permukiman	√	-	-	Rp	10,000,000.00
42	MANORO		√		Tinambung	Tangga-tangga	12 Juli 2024	Kebakaran Permukiman	√	-	-	Rp	10,000,000.00
43	FERDI		√		Tinambung	Tangga-tangga	12 Juli 2024	Kebakaran Permukiman	√	-	-	Rp	10,000,000.00
44	AHMAD		√		Tinambung	Tangga-tangga	12 Juli 2024	Kebakaran Permukiman	-	√	-	Rp	5,000,000.00
45	SUDIR		√		Tinambung	Tangga-tangga	12 Juli 2024	Kebakaran Permukiman	-	-	√	Rp	2,500,000.00
46	TENDENG		√		Tinambung	Tangga-tangga	12 Juli 2024	Kebakaran Permukiman	-	-	√	Rp	2,500,000.00
47	HENDRIK M		√		Tinambung	Tangga-tangga	12 Juli 2024	Kebakaran Permukiman	-	-	√	Rp	2,500,000.00
48	ZAINUDDIN		√		Mapilli	Ugibaru	10 Juni 2024	Kebakaran Permukiman	-	√	-	Rp	5,000,000.00
49	NAJAMIAH			√	Campalagian	Pappang	8 Juli 2024	Angin Puting Bliung	-	-	√	Rp	1,000,000.00
50	GEPINDA		√		Anreapi	Kelapa Dua	15 Juli 2024	Tanah Longsr	-	√	-	Rp	5,000,000.00
51	SAPI			√	Anreapi	Kelapa Dua	15 Juli 2024	Tanah Longsr	-	-	√	Rp	2,500,000.00
52	M.ALI		√		Mapilli	Bonra	21 Juli 2024	Kebakaran Permukiman	√	-	-	Rp	10,000,000.00
53	BAHARUDDIN		√		Mapilli	Bonra	21 Juli 2024	Kebakaran Permukiman	√	-	-	Rp	10,000,000.00

54	RUDI		√		Mapilli	Bonra	21 Juli 2024	Kebakaran Permukiman	√	-	-	Rp	10,000,000.00
55	RADEN		√		Mapilli	Bonra	21 Juli 2024	Kebakaran Permukiman	√	-	-	Rp	10,000,000.00
56	ASLAM		√		Matakali	Bonra	21 Juli 2024	Kebakaran Permukiman	√	-	-	Rp	10,000,000.00
57	JUMA ALI		√		Tapango	Tuttula	28 Juli 2024	Kebakaran Permukiman	√	-	-	Rp	10,000,000.00
58	MUSLIM		√		Tapango	Tapango Barat	4 Agustus 2024	Kebakaran Permukiman	√	-	-	Rp	10,000,000.00
59	AGUS SALIM		√		Wonomulyo	Arjosari	2 Agustus 2024	Kebakaran Permukiman	-	-	√	Rp	2,500,000.00
60	MUSMULIADI		√		Matangnga	Matangga	28 Juli 2024	Kebakaran Permukiman	√	-	-	Rp	10,000,000.00
61	RAODA			√	Mapilli	Rumpa	24 Agustus 2024	Angin Puting Beliung	-	√	-	Rp	2,500,000.00
62	SAHRUL		√		Binuang	Mammi	24 Agustus 2024	Angin Puting Beliung	-	-	√	Rp	1,000,000.00
JUMLAH									32	15	15	Rp	400,000,000.00
									62				

Keterangan.

RB : Rusak Berat = 32 Rumah

RS : Rusak Sedang = 15 Rumah

RR : Rusak Ringan = 15 Rumah

Jumlah = 62 Rumah

Polewali, 5 September 2024
Plt. Kepala Pelaksana,

TTD

SULAEMAN MK, SP. MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip :19670607 199312 1 004

B. LANGKAH KONGKRIT DALAM PELAKSANAAN MITIGASI DAN PENANGGULANGAN BENCANA



PENYERAHAN BANTUAN

Penyerahan Bantuan Korban Bencana (Kebakaran Permukiman dan Angin Puting Beliung) dari 3 Kecamatan Wonomulyo, Tapango dan Campalagian, oleh Pj Bupati Polewali Mandar Bapak Drs. Muhammad Ilham Borahima di damping Kalaksa BPBD Drs. H. Aksan Amrullah, MM. Yang dipusatkan di Pendopo Kantor Kecamatan Wonomulyo.

Kamis, 8 Februari 2024



PENYERAHAN BANTUAN

Penyerahan Bantuan Korban Bencana (Kebakaran Permukiman dan Angin Puting Beliung) dari 3 Kecamatan Wonomulyo, Tapango dan Campalagian, oleh Pj Bupati Polewali Mandar Bapak Drs. Muhammad Ilham Borahima di damping Kalaksa BPBD Drs. H. Aksan Amrullah, MM. Yang dipusatkan di Pendopo Kantor Kecamatan Wonomulyo.

Kamis, 8 Februari 2024



PENYERAHAN BANTUAN

Penyerahan Bantuan Korban Bencana (Kebakaran Permukiman dan Angin Puting Beliung) dari 3 Kecamatan Wonomulyo, Tapango dan Campalagian, oleh Pj Bupati Polewali Mandar Bapak Drs. Muhammad Ilham Borahima di damping Kalaksa BPBD Drs. H. Aksan Amrullah, MM. Yang dipusatkan di Pendopo Kantor Kecamatan Wonomulyo.

Kamis, 8 Februari 2024



PENYERAHAN BANTUAN

Penyerahan bantuan Korban Kebakaran oleh Pj Bupati Kabupaten Polewali Mandar Bapak Drs. Muhammad Ilham Borahima di dampingi Kalaksa BPBD Drs. H. Aksan Amrullah, MM dan Kadis Sosial H. Azwar yasin, S.Sos, M.Si.

Jum'at, 26 Januari 2024

MELAKUKAN SURVEI DALAM RANGKA PEMENUHAN DATA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BNPB



SURVEI LOKASI

Respon Pj Bupati Polewali Mandar Terhadap Aduan Masyarakat Ancaman Abrasi
Sungai Mandar.

Rabu, 3 Januari 2024

MELAKUKAN SURVEI DALAM RANGKA PEMENUHAN DATA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BNPB



SURVEI LOKASI

Kepala Pelaksana BPBD Polewali Mandar Drs. Aksan Amrullah, MM di dampingi Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi bersama Staf, meninjau langsung rencana usulan pembangunan Jembatan Kumbang Desa Kunyi Kecamatan Anreapi.

Rabu, 24 Januari 2024

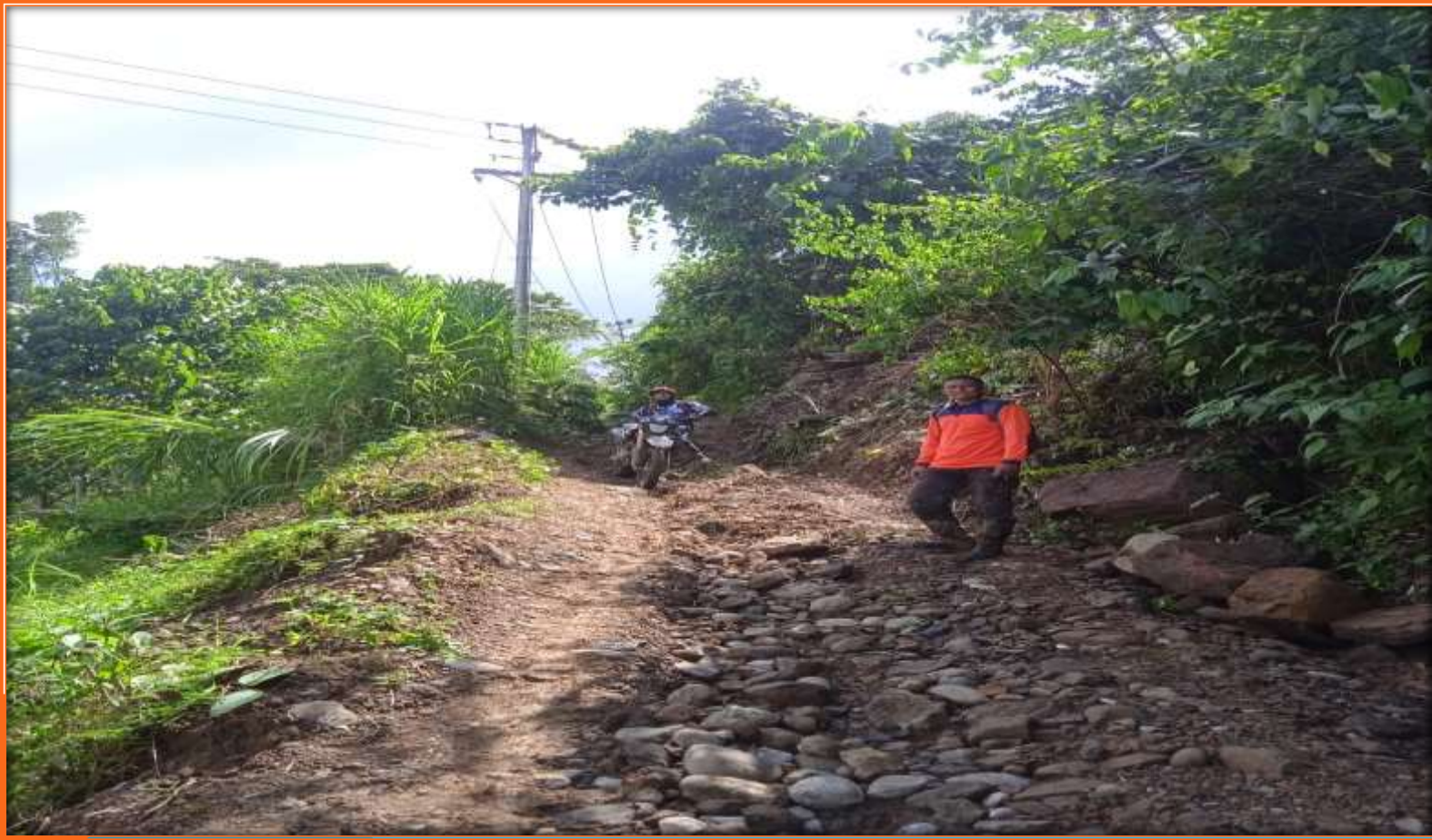
PENYERAHAN BANTUAN KORBAN BENCANA TANAH LONGSOR DESA. KELAPA DUA – KEC. ANREAPI



PENYERAHAN BANTUAN KORBAN BENCANA KEBAKARAN PEMUKIMAN DESA. BONRA – KEC. MAPILLI



**MELAKUKAN SURVEI DALAM RANGKA PEMENUHAN DATA
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BNPB
(JALAN POROS DESA TUBBI DAN DESA BESOANGING UTARA)**



**MELAKUKAN SURVEI DALAM RANGKA PEMENUHAN DATA
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BNPB
(JALAN POROS DESA TUBBI DAN DESA BESOANGING UTARA)**





LAMPIRAN 6

EVALUASI INTERNAL LAPORAN MONEV BPBD TAHUN 2024



Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Polewali Mandar

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN
RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN IV TAHUN 2024

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2024								Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2024 (%)		Ket			
					I		II		III		IV									
1	2		3	4		5		6		7		8		9 = (5+6+7+8)		10 = 9/4 x 100%		11		
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
I	PROGRAM	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik	1,659,428,479		222,308,964		644,083,296		534,663,940		247,872,199		1,648,928,399	Sangat Baik	99.19			
			Prediksi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	A																
			Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	WTP																
1	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai Standar dan Tepat Waktu	100%	10,981,980	38%	-	0%	2,278,080	50%	8,703,900	13%	-	100%	10,981,980	100%	100%			
1	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	2,285,160	1 Dok	-		-	1 Dok	2,285,160	1 Dok		3 Dok	2,285,160	100	100	RENJA 2025 RENSTRA 2025-2026		
2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	3,703,320	0 Dok	-		-	2 Dok	3,703,320	0 Dok		2 Dok	3,703,320	100	100	RANCANGAN RKA-SKPD 2025 RKA-SKPD 2025		
3		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	2,715,420	0 Dok	-		-	1 Dok	2,715,420	0 Dok		1 Dok	2,715,420	100	100	DPA-SKPD PERUBAHAN TAHUN 2024		
4		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standat dan Tepat Waktu	1 Dok	2,278,080	1 Dok	-	0 Dok	2,278,080.00		-			1 Dok	2,278,080	100	100	LAKIP 2023		
			Jumlah LPPD dan Laporan Urusan/ Fungsi Perangkat Daerah yang Tersusun sesuai Standar dan Tepat Waktu	1 Dok		1 Dok	-	0 Dok						1 Dok	-	100	#DIV/0!	LAPORAN LPPD		
2	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu	100%	1,177,331,110	22%	167,439,519	36%	432,917,376	21%	413,921,265	21%	158,052,870	100%	1,172,331,030	100%	100%			

5	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	232 Org/Bln	1,174,604,590	51 Org/Bln	167,439,519	85 Org/Bln	432,917,376	48 Org/Bln	413,921,265	48 Org/Bln	155,326,350	232 Org/Bln	1,169,604,510	100	100	5,000,080
6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	2,726,520		-		-		-	1 Lap	2,726,520	1 Lap	2,726,520	100	100	Laporan Keuangan Akhir Tahun 2024
3	Kegiatan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah	100%	1,090,011	25%	-	25%	1,090,011	25%	-	25%	-	100%	1,090,011	100%	100%	
7	Sub Kegiatan	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lap	1,090,011	1 Lap	-	1 Lap	1,090,011	1 Lap	-	1 Lap		4 Lap	1,090,011	100	100	Rekonsiliasi dan Laporan Penyusunan BMD BPBD
4	Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase PNS Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik	100%	12,265,500	0%	-	100%	12,265,500		-		-	100%	12,265,500	100%	100%	
8	Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	17 Paket	12,265,500		-	17 Paket	12,265,500		-			17 Paket	12,265,500	100	100	Pakaian Dinas Harian ASN
5	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administasi Umum Kantor	100%	213,772,219	8%	46,369,445	50%	65,790,429	23%	54,587,525	18%	41,524,820	100%	208,272,219	100%	97%	
9	Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,054,500		-	1 Paket	1,054,500		-			1 Paket	1,054,500	100	100	Lampu Bohlam
10		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	16,776,490		-	2 Paket	5,788,650		-		5,487,840	2 Paket	11,276,490	67	67	5,500,000
11		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan Minum Yang Tersedia	508 Paket	18,360,000		-	308 Paket	11,202,000	136 Paket	4,150,000	64 Paket	3,008,000	508 Paket	18,360,000	100	100	-
12		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Dsediakan	3 Paket	11,368,429		-	1 Paket	1,405,449		-	2 Paket	9,962,980	3 Paket	11,368,429	100	100	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dok	-		-		-		-			0 Dok	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Refocusing di Perubahan Anggaran
13		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	309 Lap	155,772,800	65 Lap	44,669,445	102 Lap	44,639,830	57 Lap	45,947,525	85 Lap	20,516,000	309 Lap	155,772,800	100	100	
14		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dok	10,440,000	1 Dok	1,700,000	1 Dok	1,700,000	1 Dok	4,490,000	1 Dok	2,550,000	4 Dok	10,440,000	100	100	
6	Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD	100%	5,112,660	0%	-	100%	5,112,660		-		-	100%	5,112,660	100%	100%	
15	Sub Kegiatan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	1 Paket	5,112,660		-	1 Paket	5,112,660		-			1 Paket	5,112,660	100	100	Pintu Tarik (Pintu Utama) Kantor BPBD
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-		-		-		-			0 Unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Refocusing di Perubahan Anggaran

Sisa Anggaran

Sisa Anggaran

7	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan prosedur	100%	68,153,969	24%	6,800,000	16%	32,659,460	55%	12,950,000	31%	15,744,509	125%	68,153,969	125%	100%	
16	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	130 Lap	24,000,000	31 Lap	5,100,000	18 Lap	5,100,000	78 Lap	8,700,000	42 Lap	5,100,000	169 Lap	24,000,000	130.00	100	
17		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	33,164,759	3 Lap	-	3 Lap	25,070,250	3 Lap	-	3 Lap	8,094,509	12 Lap	33,164,759	100	100	
18		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	10,989,210	3 Lap	1,700,000	3 Lap	2,489,210	3 Lap	4,250,000	3 Lap	2,550,000	12 Lap	10,989,210	100	100	
8	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMĐ	100%	170,721,030	9.52%	1,700,000	71.43%	91,969,780	9.52%	44,501,250	9.52%	32,550,000	100%	170,721,030	100%	100%	
19	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	147,630,250	2 Unit	1,700,000	2 Unit	69,779,000	2 Unit	43,601,250	2 Unit	32,550,000	8 Unit	147,630,250	100	100	3 Unit Roda 6 1 Unit Roda Empat 4 Unit Roda Dua
20		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	23,090,780	-	-	13 Unit	22,190,780	-	900,000	-	-	13 Unit	23,090,780	100	100	Terdapat belanja voucher setiap bulan
II	PROGRAM	PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa Siaga Bencana	90%	284,346,304		34,000,000		63,992,299		111,865,990		74,474,139		284,332,428	90%	99.19	
			Waktu Tanggap Darurat Setelah Kejadian	72 Jam												72 Jam		
			Persentase Pascabencana Yang Tertangani	100%												100%		
9	Kegiatan	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	30 Org	16,242,844	-	-	-	-	-	30 Orang	16,242,844	30 Orang	16,242,844	100%	100%		
21	Sub Kegiatan	Sosialisasi, Komunkasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kab/Kota yang memperoleh Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	30 Orang	16,242,844	-	-	-	-	-	30 Orang	16,242,844	30 Orang	16,242,844	100	100	Jumlah Peserta dari Kel. Tinambung, Desa Batulaya, Desa Sepabatu, Desa Tandung, Desa Karama, Desa Tangnga Tangnga, Perwakilan TNI dan POLRI	
10	Kegiatan	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	0%	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	#DIV/0!		
	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	0 Unit	-	-	-	-	-	-	-	0 Unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Refocusing di Perubahan Anggaran		
11	Kegiatan	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Bencana	100 Orang	230,274,305	22 Orang	34,000,000	15 Orang	38,011,230	25 Orang	100,031,780	24 Orang	58,231,295	86 Orang	230,274,305	86%	100%	

22	Sub Kegiatan	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	100 Lap	230,274,305	22 Lap	34,000,000	15 Lap	38,011,230	25 Lap	100,031,780	24 Lap	58,231,295	86 Lap	230,274,305	86.00	100	
12	Kegiatan	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	16 Dok	37,829,155	4 Dok	-	4 Dok	25,981,069	4 Dok	11,834,210	4 Dok	-	16 Dok	37,815,279	100%	100%	
23	Sub Kegiatan	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan Yang Tersedia	12 Dok	10,250,610	3 Dok		3 Dok	3,885,000	3 Dok	6,365,610	3 Dok		12 Dok	10,250,610	100.00	100	Laporan Harian Pusdalops, Dokumentasi Kejadian Bencana, Rekap Kejadiaan Bencana Perbulan
24		Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yg dilegalkan	4 Dok	27,578,545	1 Dok	-	1 Dok	22,096,069	1 Dok	5,468,600	1 Dok		4 Dok	27,564,669	100.00	100	13,876
		TOTAL ANGGARAN			1,943,774,783		256,308,964		708,075,595		646,529,930		322,346,338		1,933,260,827			10,513,956
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)														99.31	99.46	Kesisahan Anggaran Yang Tidak Terealisasi
		Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya :																
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya :																

Sisa Anggaran